



# LAPORAN KINERJA TAHUNAN

**DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI**

**TAHUN 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja program/kegiatan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun untuk peningkatan kualitas pelaporan kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi ke depannya.

Jakarta, Januari 2025  
Direktur Perencanaan Perwujudan  
Kawasan Transmigrasi,

La Ode Muhajirin, S.IP., M.Si  
NIP. 19720703 199101 1 001

## **RINGKASAN EKSKUTIF**

Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan/atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi berisi tentang pencapaian target dari indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, sebagai dasar penentuan Indikator Kinerja Utama.

Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja utama (IKU) beserta target yang akan dilaksanakan sebagai rencana kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Tahun 2022-2024. Indikator Kinerja Utama ini merupakan hasil reviu dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021-2024.

Pada Bulan Juni 2024 telah disampaikan usulan perubahan target Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, dan telah disetujui perubahan terhadap target IKU "Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan" yang semula berjumlah 6 Regulasi & Kebijakan, berubah menjadi 4 Regulasi & Kebijakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
2	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	2.1	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.2	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.3	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500	Hektar (Ha)
3	Terbangunnya komitmen	3.1	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja	80	Persen

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	internal dan eksternal Kementerian ( lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)		(%)
		3.2	Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	75	Persen (%)
4	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	4	Kebijakan & Regulasi
5	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	5.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen (%)

Capaian kinerja Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024, tidak bisa dilepaskan dari pencapaian kinerja penganggaran yang juga dapat terealisasi sesuai dengan target ditentukan, sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tahun 2024, mencapai 99,97%.
2. Capaian Kinerja tahun 2023, mencapai 100%.
3. Efisiensi penggunaan anggaran, tahun 2024 mencapai 0,03%.

Pengukuran Capaian Kinerja pelaksanaan Program kegiatan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan sebagaimana tabel diatas dengan realisasi sebagai berikut:

**CAPAIAN KINERJA TA 2024  
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%
2	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	2.1	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000 Ha	1.166,83 Ha	152,73%
		2.2	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertifikat HPL	1.000 Ha	1.424,49 Ha	101,84%
		2.3	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500 Ha	500 Ha	100%
3	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian ( lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan	3.1	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan	80 Persen (%)	80 Persen (%)	100%

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
	Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)			
		3.2	Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	75 Persen (%)	75 Persen (%)	100%
4	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	4 Kebijakan & Regulasi	4 Kebijakan & Regulasi	116,67%
5	Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	5.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73 Persen (%)	41,82 Persen (%)	41,82 %

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Isu-isu Strategis .....	11
E. Maksud dan Tujuan .....	12
F. Sistematika Penyajian .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. Rencana Strategis (RENSTRA) .....	14
B. Perjanjian Kinerja .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
A. Capaian Kinerja .....	25
B. Realisasi Anggaran .....	71
C. Capaian Kinerja Lainnya .....	74
BAB IV PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79
LAMPIRAN .....	81

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Transmigrasi .....	16
Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Ketransmigrasian Pada Kurun Waktu 2020-2024 .....	17
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 2020-2024 .....	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 .....	20
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 .....	22
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi .....	28
Tabel 3.2 Capaian IKU 1.1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan .....	34
Tabel 3.3 Capaian IKU 1.2 Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan .....	39
Tabel 3.4 Capaian IKU 2.1 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL.....	40
Tabel 3.5 Capaian IKU 2.2 Luasan Tanah Yang Difasilitasi Pengurusan Sampai Dengan Penerbitan Sertipikat HPL .....	41
Tabel 3.6 Capaian IKU 2.3 Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi .....	43
Tabel 3.7 IKU 4.1 Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan .....	51
Tabel 3.8 Penggunaan Kebijakan dan Regulasi (NSPK) .....	51
Tabel 3.9 Realisasi Tindak Lanjut LHP BPK Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi .....	53

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 .....	54
Tabel 3.11 RPJMN Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi .....	56
Tabel 3.12 Perbandingan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMN 2020- 2024 dan Kepmendesa Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024 .....	60
Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .....	61
Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2023 .....	64
Tabel 3.15 Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	69
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi.....	71
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Penganggaran Tahun 2024 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi.....	73

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi .....	4
Gambar 1.2 Data ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Gambar 1.3 Data ASN berdasarkan Golongan .....	9
Gambar 1.4 Data ASN berdasarkan Jabatan .....	10
Gambar 1.5 Data Non ASN Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi .....	10
Gambar 1.6 Data Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
Gambar 3.1 Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran Strategi .....	27
Gambar 3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi .....	68
Gambar 3.3 Kurva S Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Januari Sampai Dengan Desember 2024 .....	73

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, Kementerian/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara periodik baik secara triwulan/semester/tahunan, serta merupakan salah satu bentuk manifestasi dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu berpedoman pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, sebagai dasar penentuan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan (informasi) kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan, sasaran dan target. Capaian kinerja selain tertuang dalam laporan kinerja dituangkan juga ke dalam aplikasi E-SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai rekaman dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi berisi tentang pencapaian target dari indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Didalam laporan kinerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan atau penyusunan kegiatan di tahun selanjutnya.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas "Melaksanakan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi". Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, dengan melaksanakan tugas "penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi".

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

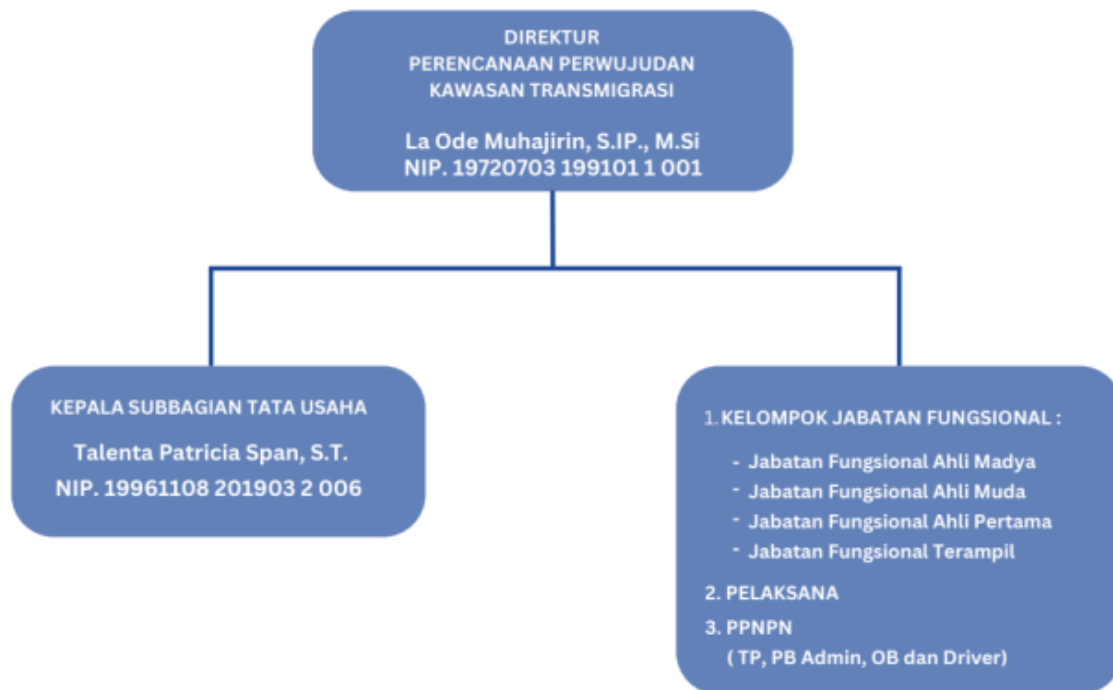
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru,

- fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru,fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisas tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
  6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat;

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyesuaian Sistem Kerja Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi terdiri dari: Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana, dan PPNPN yang tergambar sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi telah membentuk 27 Tim Kerja Tahun 2024 pada Subbagian Tata Usaha dan Unit Teknis sesuai dengan bidang kerja, yaitu:

### 1. Subbagian Tata Usaha

mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Tim Kerja pada Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- Tim Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga, Persuratan, serta Kearsipan Dit. P2KT;
- Tim Layanan Administrasi Kepegawaian;
- Tim Layanan Daftar Inventarisasi dan Pemeliharaan Barang Milik Negara;

- d. Tim Layanan Kinerja dan Laporan Kegiatan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;
- e. Tim Layanan Pengelola Keuangan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;
- f. Tim Layanan Penyusunan Media Informasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Majalah Transpolitan);
- g. Tim Internal Pembentukan Zona Integritas Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;
- h. Tim Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi.

## **2. Tim Kerja pada Bidang Fasilitas Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru**

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan penyusunan rencana detail kawasan perkotaan baru. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Fasilitas Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan.

Tim Kerja pada Fasilitas Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru terdiri dari:

- a. Tim Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB;

- b. Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Mendukung Transpolitik;
- c. Tim Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Transmigrasi di Perbatasan Negara Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Tim Penyusunan Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang;
- e. Tim pencermatan 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas pada Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029.

### **3. Tim Kerja pada Bidang Fasilitas Legalisasi Tanah**

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang legalisasi tanah sebagai dasar penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Fasilitas Legalisasi Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis satuan permukiman; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuan permukiman.

Tim Kerja pada Fasilitas Legalisasi Tanah terdiri dari:

- a. Tim Klarifikasi Pengurusan HPL Transmigrasi;
- b. Tim Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Untuk Lahan Usaha Ii Transmigrasi Lokasi Batubi SP.1, SP.2, dan SP.3, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Tim Klarifikasi Pengurusan Dan Pengelolaan Hpl Transmigrasi Wilayah Sumatera;
- d. Tim Klarifikasi Pengurusan Dan Pengelolaan Hpl Transmigrasi Wilayah Kalimantan;

- e. Tim Klarifikasi Pengurusan Dan Pengelolaan HPL Wilayah Sulawesi, Maluku Utara, Ntt, Ntb, Dan Papua.

#### **4. Tim Kerja pada Bidang Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan**

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana teknis satuan permukiman dan rencana teknis pusat satuan Kawasan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi fasilitasi penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan rencana teknis pusat satuan Kawasan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana kawasan; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana prasarana kawasan.

Tim Kerja pada Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan terdiri dari:

- a. Tim Monitoring dan Pendampingan RTSP-RT Pusat SKP;
- b. Tim Pencermatan Dokumen RTSP;
- c. Tim Perumusan Standar Nasional Indonesia Gerakan Gotong Royong Tetrapreneur (SNI G2RT);

#### **5. Tim Kerja Bidang Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi**

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembangan ekonomi; dan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembangan sosial budaya.

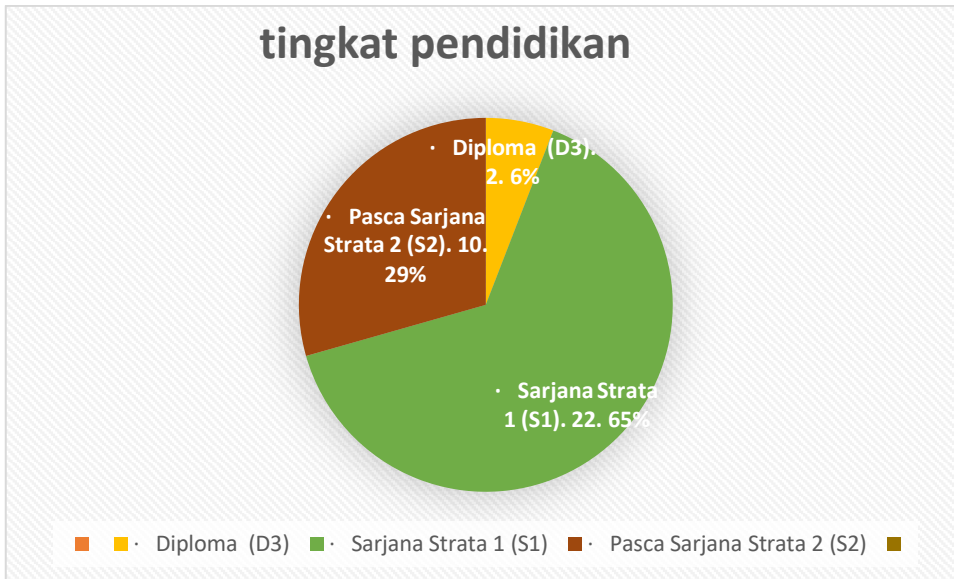
Tim Kerja pada Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Tim Klarifikasi Bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat;
- b. Tim Updating Data Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi;
- c. Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru;
- d. Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi;
- e. Tim Kawasan Transmigasi di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia;
- f. Tim Kerja Percepatan Kemandirian Masyarakat Melalui Optimalisasi Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Jagung di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.

### **C.1. Dukungan Personel**

Dalam menjalankan kegiatan operasional Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi s.d 31 Desember 2023, didukung jumlah personel berjumlah 69 orang, dengan rincian sebagai berikut:

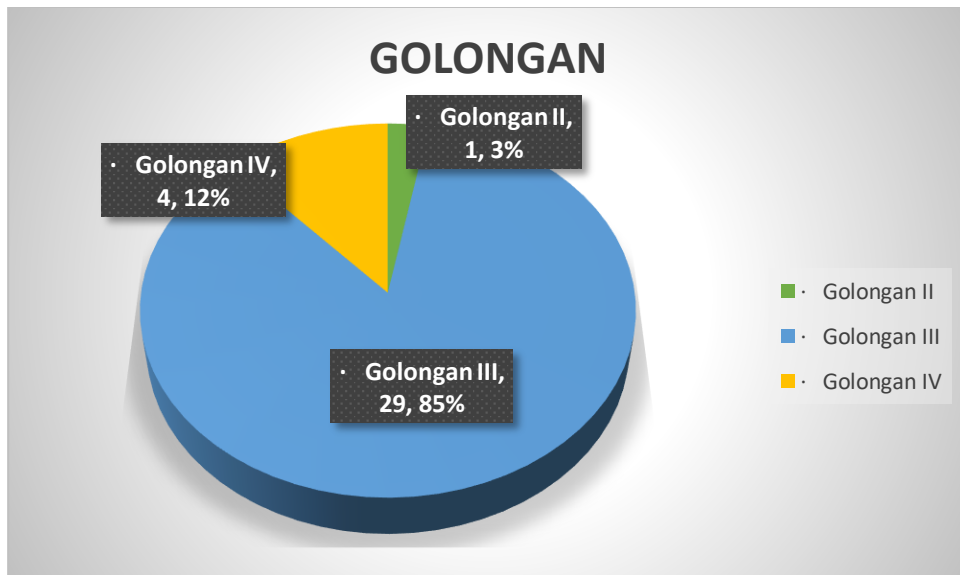
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) : 37 orang
  - 1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :



Gambar 1.2 Data ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Diploma (D3) : 2 Orang
- Sarjana Strata 1 (S1) : 22 Orang
- Pasca Sarjana Strata 2 (S2) : 10 Orang

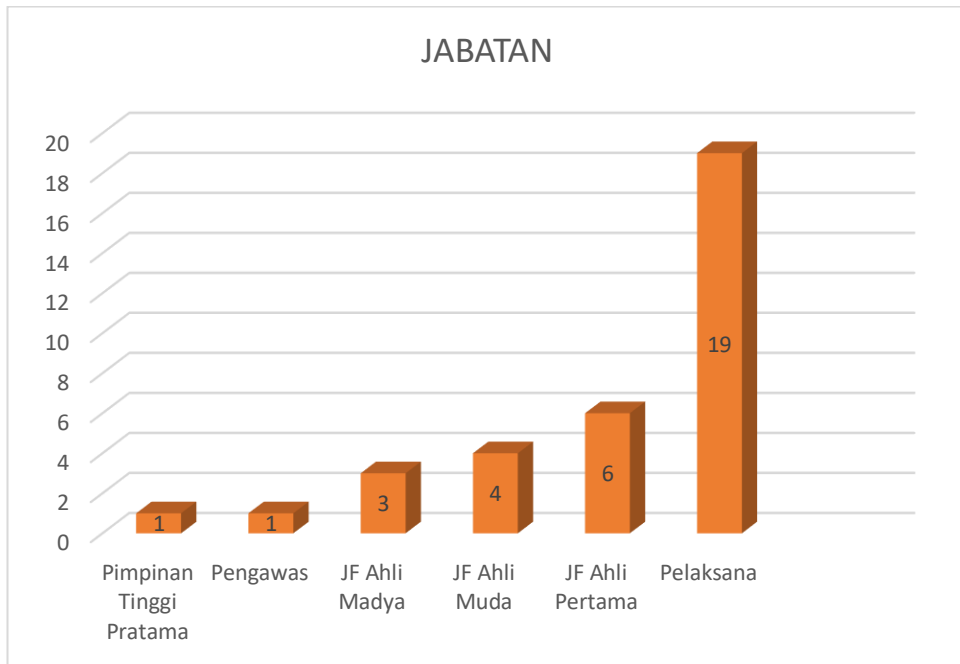
2) Berdasarkan Golongan :



Gambar 1.3 Data ASN berdasarkan Golongan

- Golongan II : 1 Orang
- Golongan III : 29 Orang
- Golongan IV : 4 Orang

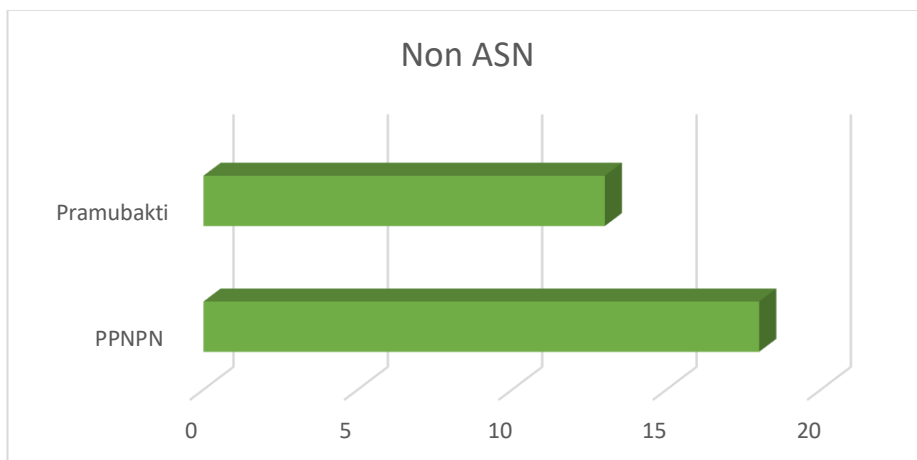
3) Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.4 Data ASN berdasarkan Jabatan

- Pimpinan Tinggi Pratama : 1 Orang
- Pengawas : 1 Orang
- Fungsional Ahli Madya : 4 Orang
- Fungsional Ahli Muda : 7 Orang
- Fungsional Ahli Pertama : 1 Orang
- Fungsional Terampil : 1 Orang
- Pelaksana : 23 Orang

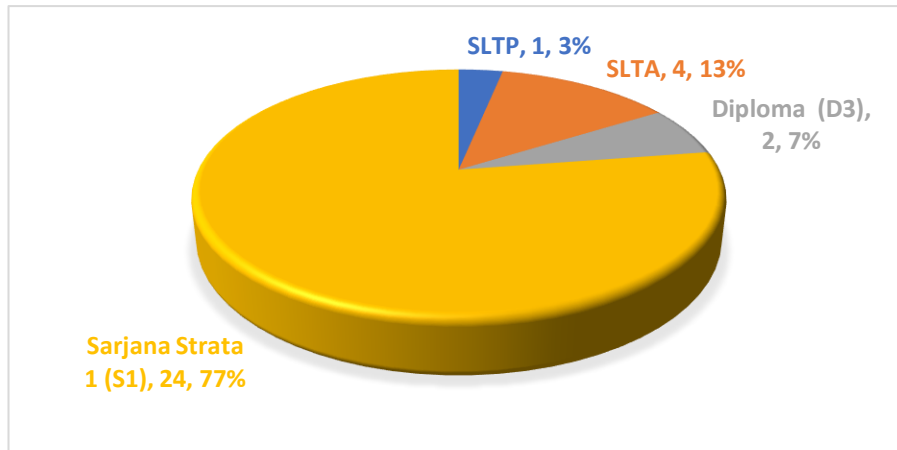
b. Non ASN : 32 orang terdiri dari



Gambar 1.5 Data Non ASN Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

- PPNPN : 20 Orang
- Pramubakti : 12 Orang

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan:



Gambar 1.6 Data Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

- SLTP : 1 Orang
- SLTA : 4 Orang
- Diploma (D3) : 2 Orang
- Sarjana Strata 1 (S1) : 24 Orang

#### D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pada Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi untuk pelaksanaan program transmigrasi, yakni sebagai berikut :

- Belum terinventarisasi dokumen Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah HPL Transmigrasi belum dapat dilakukan;
- Status legalitas lahan dalam perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi belum *Clear and Clean*;
- Ketersediaan dokumen perencanaan program transmigrasi tidak sesuai dengan bisnis proses perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- Belum adanya tindaklanjut dari dokumen perencanaan program transmigrasi yang telah ada sebagai acuan pelaksanaan program transmigrasi selanjutnya.

## **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang disusun setiap tahunnya memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Pertama, sebagai sarana bagi organisasi untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Kedua, sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dua fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Tahun 2024.

Untuk itu, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, dimana Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi atas capaian kinerjanya selama tahun 2024;
2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, dimana Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dalam upaya perbaikan kinerjanya dimasa mendatang.

## **F.SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini memberikan informasi tentang rencana strategis yang meliputi visi misi, tujuan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta perjanjian kinerja .

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan tentang capaian kinerja dengan membahas dan menganalisis per Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya perbandingan antara target dan realisasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Serta menginformasikan realisasi anggaran yang meliputi Realisasi anggaran per Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Anggaran Pusat.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis capaian kinerja yang terhimpun dalam bentuk laporan kinerja.

## LAMPIRAN

Berisikan berbagai data dukung dari tersusunnya laporan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Oleh karena itu, seluruh Kementerian/Lembaga wajib untuk menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpatokan pada RPJMN yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan pembangunan desa, perdesaan, kawasan transmigrasi dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam RPJM tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Selain RPJMN berfungsi sebagai alat Kontrol Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk melihat sejauhmana program perencanaan pembangunan yang telah disusun mampu diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga teknis dengan baik.

##### **A.1. Visi**

Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024 mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**.

Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Sejalan dengan Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020-2024, dalam pembangaunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi, adapun Visi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 2020-2024 **“Tersedianya Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi**

## **Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Berkesinambungan”.**

### **A.2. Misi**

Dengan Visi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi akan dapat dicapai melalui misi:

1. Memfasilitasi penyediaan lahan transmigrasi yang memenuhi kriteria *clear and clean*;
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan;
4. Memfasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan Masyarakat;
5. Meningkatkan Penatakelolaan yang baik.

### **A.3. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada kurun 2020-2024, sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.

Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan, juga diharapkan mampu untuk dapat mencapai tujuan lainnya secara simultan, yaitu:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
4. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

5. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

Selain secara simultan, adapun tujuan perencanaan perwujudan Kawasan transmigrasi yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024 dalam mencapai visi adalah:

1. Mendorong terwujudnya Kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing dengan lahan yang *clear and clean* serta didukung perencanaan yang tepat;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Masyarakat di Satuan Permukiman (SP), Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dan Kawasan Transmigrasi.

Target kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Transmigrasi mengacu dan memberikan sumbangan kepada tercapainya sasaran strategis bidang ketransmigrasin yang tercantum dalam RENSTRA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun RPJMN 2020 -2024. Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, seperti yang disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Target kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Program Pengembangan Transmigrasi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Sasaran	Target Per Tahun					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan dalam mendukung pertumbuhan wilayah								
1.	Meningkatnya rata - rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata - rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	48,7	48,7	50,93	53,12	55,31	Nilai indeks dari 0 - 100

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Sasaran	Target Per Tahun					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Meningkatnya rata - rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata - rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	39,83	41,38	42,93	44,48	46,14	Nilai indeks dari 0 - 100

#### A.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi bidang ketransmigrasian pada kurun waktu 2020-2024 tentunya mengacu kepada arah kebijakan strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan dan strategi bidang ketransmigrasian yang terkait dengan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Ketransmigrasian Pada Kurun Waktu 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penyediaan dan Pelayanan Pertanahan	Penyelesaian permasalahan adanya okupasi/sengketa dengan masyarakat tempatan, tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, ketidaktersediaan lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan kasus lainnya.
		Penyelesaian permasalahan penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan (SK HPL) dan sertifikasi hak milik tanah untuk transmigran.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi, termasuk perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakatnya dan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi kebijakan, perencanaan, dan tatakeloka penganggaran lintas K/L/D/M.
3.	Peningkatan Sinergitas Pembangunan	Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa). Dunia usaha dan mitra

No	Arah Kebijakan	Strategi
	Transmigrasi Antar K/L/D/M	pembangunan melalui penyusunan <i>Grand Design</i> Kawasan Transmigrasi untuk pedoman bagi seluruh <i>Stakeholders</i>
		Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan
		Mengembangkan kerjasama antar kawasan transmigrasi dengan kawasan lainnya

Target kinerja Program Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi mengacu kepada tercapainya sasaran strategis bidang ketransmigrasian yang tercantum dalam RENSTRA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun RPJMN 2020-2024.

Selanjutnya, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan programnya berdasarkan pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang sejalan dengan RPJMN Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi khususnya bidang perencanaan perwujudan Kawasan transmigrasi 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan kawasan transmigrasi dan pengembangan masyarakat	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang ditetapkan
2.	Tersedianya dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran
3.	Tersedianya tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL
4.	Transmigrasi	Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
5.	Terukurnya perkembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi
6.	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)
7.		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

## B. PERJANJIAN KINERJA

Sebelum menjalankan program/kegiatannya, setiap Unit Kerja pada instansi pemerintah dipastikan untuk menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, adalah sebagai perwujudan nyata, komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Untuk itu, perjanjian kinerja disusun dan diperjanjikan oleh seluruh entitas akuntabilitas setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada awal Tahun 2024:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
2	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	2.1	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.2	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.3	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500	Hektar (Ha)
3	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian ( lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.1	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	80	Persen (%)
		3.2	Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi	75	Persen (%)

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
			sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)		
4	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	6	Kebijakan & Regulasi
5	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	5.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen (%)

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) indikator kinerja utama (IKU) beserta target yang akan dilaksanakan sebagai rencana kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024. Dimana sebelumnya pada Tahun 2023 telah dilakukan penelaahan dan pembahasan internal Kementerian, yang menghasilkan target IKU dan rekomendasi perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dituangkan dalam Laporan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pada Bulan Juni 2024 telah disampaikan usulan perubahan target Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, yang selanjutnya dilaksanakan pembahasan lanjutan terkait revisi IKU. Hasil dari pembahasan tersebut yaitu disetujuinya perubahan terhadap target IKU "Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan" yang semula

berjumlah 6 Regulasi & Kebijakan, berubah menjadi 4 Regulasi & Kebijakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi setelah revisi.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 Setelah Revisi

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
2	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	2.1	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.2	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.3	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500	Hektar (Ha)
3	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian ( lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.1	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	80	Persen (%)
		3.2	Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi	75	Persen (%)

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)		
4	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	4	Kebijakan & Regulasi
5	Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	5.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen (%)

Selain tersusunnya Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dari Eselon II kepada Eselon I, untuk pejabat struktural pengawas disusun juga Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Eselon II.

Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi berisikan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target dalam pencapaian kinerja Tahun 2024, yang tertera sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Layanan Ketatausahaan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	1.1	Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian Direktorat	12 Bulan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		1.2	Layanan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Direktorat	12 Bulan

Tabel 2.5 menerangkan bahwa sasaran kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha yaitu "Terlaksananya Layanan Ketatausahaan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi" dengan jumlah 2 (dua) indikator kinerja utama yang dilaksanakan dengan dukungan Tim Kerja Subbagian Tata Usaha, antara lain:

1. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian Direktorat dengan target 12 bulan, yang meliputi:
  - a. Laporan Kegiatan Direktorat yang disusun secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  - b. Laporan Pembinaan Kepegawaian Direktorat yang disusun secara rutin maupun *conditional*.
2. Layanan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Direktorat dengan target 12 bulan, yang meliputi: Persuratan dan Kearsipan, Administrasi BMN, Administrasi ATK dan Layanan Pimpinan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan/atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyusunan dan Penyampaian laporan pelaksanaan akuntabilitas minimal setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang sekaligus juga sebagai suatu kegiatan evaluasi, yang dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans) "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTrans), Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Capaian kinerja merupakan hasil rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD) sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai tujuan

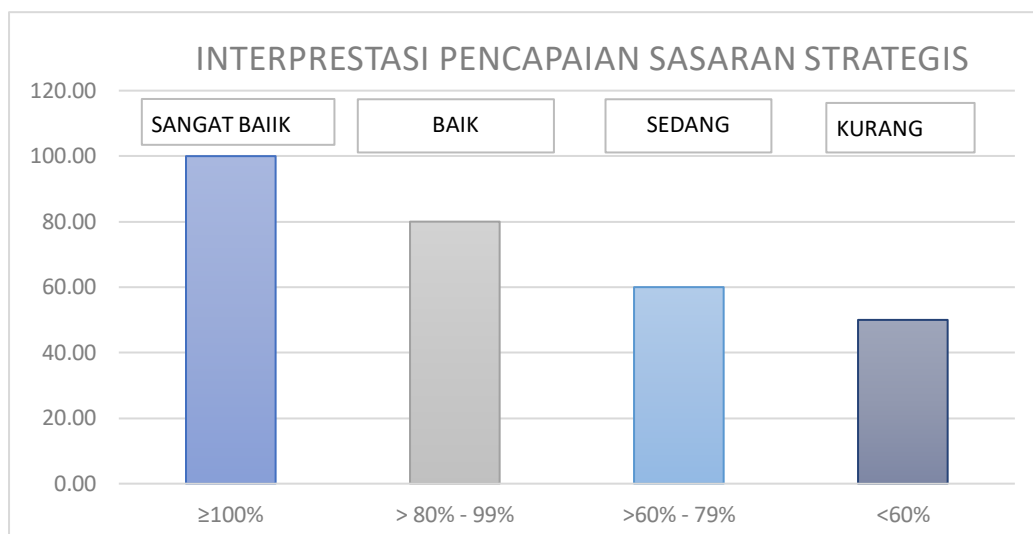
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sedangkan untuk mengetahui capaian kinerja harus dilakukan pengukuran kinerja yaitu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian dari proses ini akan dihasilkan Laporan Kinerja sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang informasi capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran.

Dalam pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Guna mempermudah dalam melakukan interpretasi atas pencapaian sasaran strategi, yaitu dengan mempergunakan metode *scoring* (penilaian) yang menampilkan hasil penilaian disertai makna nilai tersebut. Dibawah ini adalah tabel penilaian dan pemaknaan nilai yang dipergunakan:



Gambar 3.1 Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran Strategi

### A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Realisasi Kinerja adalah data yang menyajikan informasi terkait Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Tahun 2024. Data tersebut disajikan secara terperinci bertujuan untuk melihat secara detail realisasi setiap indikator kinerja utama yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024. Perjanjian Kinerja adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selanjutnya, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di perjanjikan (PK), tidak terlepas dari keberhasilan dan permasalahan. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya kebijakan pemerintah terkait pemotongan/blokir anggaran. Oleh karena itu, Dit. P2KT beserta tim kerja yang ada tetap semangat dan berupaya untuk memenuhi target dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, sehingga tercapai realisasi kegiatan.

Berikut target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024  
Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%
2	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	2.1	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000 Ha	1.166,83 Ha	152,73%
		2.2	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000 Ha	1.424,49 Ha	101,84%
		2.3	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500 Ha	500 Ha	100%
3	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian ( lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.1	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	80 Persen (%)	80 Persen (%)	100%

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3.2	Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	75 Persen (%)	75 Persen (%)	100%
4	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	4 Kebijakan & Regulasi	4 Kebijakan & Regulasi	116,67%
5	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	5.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73 Persen (%)	41,82 Persen (%)	41,82 %

Berdasarkan Tabel 3.1 untuk dapat mencapai target sesuai indikator kinerja utama, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 3.559.822.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) pada awal Tahun 2024. Namun seiring tahun berjalan terdapat revisi anggaran beberapa kali pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 alokasi anggaran pada DIPA Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi sebesar Rp. 4.259.822.000 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), karena terdapat penambahan anggaran sebesar 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan pemblokiran sebesar 405.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Dapat terlihat bahwa target indikator kinerja utama dapat tercapai secara keseluruhan bahkan ada realisasi yang melampaui target. Sedangkan untuk target IKU "Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti" merupakan mandatory yang harus diselesaikan, sehingga masih terus berjalan proses Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan (TLHP) di setiap unit kerja dan belum bisa terealisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi untuk masing-masing sasaran kinerja tercapai dengan melalui tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2024 sebagai berikut:

## **1. Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi**

### **a. IKU 1.1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan**

Indikator Kinerja Utama "Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan" merupakan dokumen rencana pembangunan kawasan transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan 152 kawasan transmigrasi berupa Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP), Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Pusat SKP, dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, terdapat 3 (tiga) realisasi kegiatan yang merupakan *output* dari IKU ini yaitu:

#### **1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dalam rangka Mendukung Konsep Transpolitan**

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru sebagai upaya mewujudkan Rencana Detail KPB melalui Konsep Transpolitan di Kawasan Transmigrasi Telang Kabupaten Banyuasin adalah merumuskan kebijakan rencana perwujudan kawasan transmigrasi dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan hingga penyusunan konsep rencana pembangunan KPB sesuai dengan peraturan yang ada serta untuk mendukung terciptanya Kawasan Transmigrasi yang terpadu, produktif

dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara multi-disiplin dari para pakar lintas fakultas di Universitas Gadjah Mada dengan mengedepankan konsep transpolitan melalui pendekatan *iconic branding* kawasan, ekonomi *tetrapreneur*, produk inovasi, hilirisasi IPTEK, SDM Millennial, dan *pentahelix cooperation*.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan menghasilkan 1 (satu) dokumen, telah melewati proses tahapan:

- a) Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Mendukung Konsep Transpolitan;
- b) Rapat Persiapan Pembahasan Muatan Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru dan Konsep TSM Milenial;
- c) Rapat Pembahasan Materi Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru dan TSM Millennial;
- d) Rapat Persiapan Turun Lapang ke Kawasan Transmigrasi Telang;
- e) Rapat Laporan Pendahuluan Penyusunan Rencana Pembangunan KPB di Kawasan Trasmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- f) Kegiatan Turun Lapang ke Kawasan Transmigrasi Telang;
- g) Ekspose Laporan Akhir Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Mendukung Konsep Transpolitan di Yogyakarta;
- h) Laporan Akhir Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Mendukung Konsep Transpolitan di Yogyakarta.

## **2) Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Transmigrasi di Perbatasan Negara Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat**

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi (P2KT) sesuai dengan fungsinya menyiapkan bahan arah kebijakan dan rencana strategi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara. Diantaranya fungsi tersebut yaitu menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kawasan perkotaan baru atau KPB kawasan transmigrasi. Pembangunan KPB ini merupakan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara.

kegiatan ini sebagai kajian awal dalam upaya bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan serta masyarakat dalam melaksanakan pengembangan kawasan transmigrasi yang mendukung pertumbuhan pusat pusat ekonomi kawasan perbatasan negara. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan atau metodologi mengidentifikasi potensi dan melihat sejauh mana peran serta penentuan kriteria pembangunan KPB kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal yang terhubung dengan pusat pusat pertumbuhan ekonomi lainnya seperti PSKN perbatasan.

Laporan ini merupakan salah satu bagian dari kelengkapan pelaporan yang dibutuhkan dalam kegiatan Kajian Rencana Detil Kawasan Perkotaan Baru Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Perjalanan Dinas ini memuat pendahuluan, kajian kebijakan, profil wilayah, dan hasil pengumpulan data dan informasi. Adapun Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Transmigrasi di Perbatasan Negara Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat menghasilkan 1 (satu) dokumen, telah melewati tahapan:

- a) Penyusunan dan penerbitan SK Narasumber Kegiatan kajian rencana pembangunan kawasan perkotaan baru transmigrasi di perbatasan negara kab. sambas prov. kalimantan barat;

- b) Kegiatan Turun lapang ke kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- c) Rapat Laporan Akhir kegiatan kajian rencana pembangunan kawasan perkotaan baru transmigrasi di perbatasan negara kab. sambas prov. kalimantan barat;
- d) FGD Kegiatan kajian rencana pembangunan kawasan perkotaan baru transmigrasi di perbatasan negara kab. sambas prov. kalimantan barat;
- e) Rapat Laporan Akhir kegiatan kajian rencana pembangunan kawasan perkotaan baru transmigrasi di perbatasan negara kab. sambas prov. kalimantan barat;
- f) Terbit Laporan Akhir kegiatan kajian rencana pembangunan kawasan perkotaan baru transmigrasi di perbatasan negara kab. sambas prov. kalimantan barat.

### **3) Monitoring dan Pendampingan RTSP- RT Pusat SKP**

Kegiatan Monitoring dan Pendampingan RTSP - RT Pusat SKP dilakukan untuk memperoleh perkembangan perencanaan dalam penyusunan dokumen RTSP dan Rencana Teknis Pusat SKP, pemantauan terhadap implementasi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan Pendampingan dilaksanakan sebagai upaya agar dokumen perencanaan RTSP maupun RT Pusat SKP yang disusun dapat menghasilkan dokumen yang sesuai dengan standar dan dapat dipergunakan dalam tahap pembangunan.

Adapun kegiatan Monitoring dan Pendampingan RTSP dilakukan terhadap calon lokasi SP yang menjadi program pembangunan/penempatan pada tahun berjalan, lokasi yang telah di ekpos dokumen RTSP atau RT Pusat SKP di pusat, ataupun lokasi yang sedang disusun dokumen RTSP atau RT Pusat SKP.

Monitoring dan Pendampingan RTSP - RT Pusat SKP menghasilkan 1 (satu) dokumen, telah dilaksanakan dengan mekanisme:

- a) Persiapan, meliputi:

- (1) Konsolidasi tim kerja pelaksana kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
  - (2) Pengumpulan data/bahan surat usulan dinas daerah, peta-peta dan data sekunder lainnya tentang calon lokasi yang memerlukan penyusunan RTSPRT Pusat SKP atau yang memiliki kendala/permasalahan dengan kegiatan RTSP – RT Pusat SKP, dan Pengumpulan data dokumen RTSP;
  - (3) Koordinasi dengan pihak dinas daerah provinsi dan/kabupaten mengenai mekanisme pelaksanaan monitoring dan pendampingan RTSP – RT Pusat SKP.
- b) Pelaksanaan Kegiatan, yaitu kegiatan Monitoring dan Pendampingan RTSP – RT Pusat SKP dilaksanakan melalui tinjauan lapangan, diantaranya: penjelasan kepada pihak dinas daerah mengenai konsep dan prosedur penyusunan RTSP-RT Pusat SKP, wawancara/penggalian informasi dengan pihak masyarakat setempat, mengamati kondisi fisik lokasi, memeriksa aksesibilitas lokasi, kelayakan calon lokasi perencanaan, kelengkapan data dan peta calon lokasi, pendataan permasalahan, dan pengambilan dokumentasi.
- c) Pelaporan, Laporan akhir yang berisi tentang laporan perjalanan dinas/Berita Acara Lapangan serta seluruh hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil olah dan analisis serta proses/rangkaian kegiatan sampai dengan kesimpulan serta dokumentasi lainnya.

Tabel 3.2 Capaian IKU 1.1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

	Bidang Teknis	Jenis Dokumen	Realisasi	Capaian
1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan			
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dalam rangka	3 Dok	100%

	Bidang Teknis	Jenis Dokumen	Realisasi	Capaian
		Mendukung Konsep Transpolitan; 2. Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Transmigrasi di Perbatasan Negara Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat.		
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	3. Monitoring dan Pendampingan RTSP- RT Pusat SKP		

**b. IKU 1.2 Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan**

Indikator Kinerja Utama “Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan” merupakan Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan 152 kawasan transmigrasi berupa Rencana Pengembangan SP, Rencana Pengembangan Pusat SKP, Rencana Pengembangan SKP, Rencana Pengembangan KPB, Rencana pengembangan Kawasan transmigrasi.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, terdapat 3 (tiga) realisasi kegiatan yang merupakan *output* dari IKU ini yaitu:

**1) Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB**

Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB merupakan bagian dari rencana pembangunan kawasan transmigrasi. Adapun SKP atau Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru. Sedangkan KPB atau Kawasan Perkotaan Baru adalah bagian dari Kawasan

Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian dibutuhkan wadah untuk pemerintah pusat melakukan bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB.

Laporan memberikan informasi mengenai klarifikasi dan koordinasi terhadap dokumen Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Selain itu juga dilaporkan beberapa kegiatan dukungan teknis lainnya yang terkait perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi.

Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB menghasilkan 1 (satu) dokumen, telah melaksanakan tahapan:

- a) Rapat Persiapan dan lanjutan Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB;
- b) Rapat Pembahasan Materi Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru dan TSM Millennial;
- c) Rapat Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP & Rencana Detail KPB dan Rapat Koordinasi Nasional;
- d) Klarifikasi dan Survei Lapangan ke Kawasan Transmigrasi Telang;
- e) Klarifikasi kegiatan Kajian Analisis Risiko Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- f) Mengikuti Kegiatan dan Workshop di Daerah;
- g) Rapat ekspose laporan akhir kegiatan penyusunan KPB Telang di Yogyakarta;
- h) Rapat Laporan Akhir Kegiatan Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru;
- i) Rapat Laporan Akhir Lanjutan Kegiatan Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru.

## **2) Kegiatan Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang**

Visualisasi ini adalah video yang mendokumentasikan kenyataan. video dokumenter sebagai produk audio visual merupakan salah satu media komunikasi yang dapat digunakan sebagai media dalam menyampaikan pesan melalui plot cerita yang disampaikan oleh pembuat film kepada penonton. Selain itu, sebagai media komunikasi massa film memiliki fungsi untuk dapat menyampaikan pesan dalam bentuk informasi, edukasi, dan hiburan. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan visualisasi Perencanaan Detail Tata Ruang (*siteplan*) di KPB Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan Menyampaikan informasi terkait program Transmigrasi mendukung Rencana Pembangunan Kawasan Kota Baru di Kawasan Transmigrasi Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang menghasilkan 1 (satu) dokumen, dengan melalui tahapan pekerjaan:

### **a) Pra Produksi**

Pra produksi adalah tahapan persiapan produksi. Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dokumenter, seperti melakukan riset, rapat, menyusun naskah, membuat deck atau storyboard, membentuk tim ahli, menyusun jadwal produksi, menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dll.

### **b) Produksi**

Produksi adalah tahapan dimulainya proses perekaman audio visual dokumenter. Pada pekerjaan ini tahap produksi meliputi pengambilan gambar sesuai rancangan naratif dan konsep visual, perakaman suara selama proses produksi berlangsung dan melakukan sesi wawancara bersama narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

### **c) Pasca Produksi**

Pasca produksi adalah tahapan akhir dari rangkaian proses produksi. Pada tahapan akhir pekerjaan Pengadaan Rencana Pembangunan

Perkotaan Baru Kawasan Transmigrasi Telang, Kabuapten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ini, dilakukan proses editing offline atau penyusunan gambar sesuai storyboard, dan editing online atau koreksi warna pada video serta penambahan infografis, perekaman voice over, penyusunan musik, audio mixing hingga film mastering.

### **3) Klarifikasi bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat**

Kegiatan Klarifikasi bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat ini bertujuan untuk menentukan lokasi prioritas yang layak dilakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan potensi dan permasalahan yang teridentifikasi. Klarifikasi lapangan telah memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi aktual kawasan transmigrasi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Adapun data yang diperoleh dari kegiatan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi di masa depan. Selanjutnya laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan klarifikasi bidang perencanaan pengembangan masyarakat di beberapa kawasan transmigrasi.

Klarifikasi Bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat menghasilkan 1 (satu) dokumen, dengan melalui tahapan:

- a) Rapat persiapan untuk pembagian kelompok kerja dalam matriks peran hasil dan penyusunan tugas tim kerja;
- b) Pelaksanaan kegiatan, dengan melakukan koordinasi dengan dinas transmigrasi di daerah dan tinjau lapang, serta evaluasi rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- c) Rapat Penyusunan Laporan sementara Kegiatan Klarifikasi Bidang Renbangmas;
- d) Rapat laporan akhir kegiatan klarifikasi bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Tabel 3.3 Capaian IKU 1.2 Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

	Bidang Teknis	Jenis Dokumen	Realisasi	Capaian
1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan			
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru	1. Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB; 2. Kegiatan Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang.	3 Dok	100%
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	3. Klarifikasi bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat		

## 2. Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

### a. IKU 2.1 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL

Pengurusan Penerbitan SK HPL adalah Proses Pengusulan Penerbitan SK HPL Transmigrasi dari Dinas yang membidangi Transmigrasi atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten.

Langkah yang dilakukan dalam kegiatan fasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL:

- 1) Berkoordinasi dan mendorong Dinas Transmigrasi Kabupaten/Provinsi untuk segera melengkapi dokumen pengurusan penerbitan SK HPL baik di Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kanwil BPN Provinsi;
- 2) Membantu memfasilitasi dalam hal koordinasi dan konsultasi antara Dinas Transmigrasi Kabupaten/Provinsi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten

dan Kanwil BPN Provinsi untuk mengetahui progress dan kendala pengurusan penerbitan SK HPL Transmigrasi;

Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL, memiliki target 1.000 Ha realisasi 1.424,49 Ha, dengan capaian 142,45%.

Tabel 3.4 Capaian IKU 2.1 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL

No	Bidang Teknis	Keterangan		
		Lokasi/Kab/Provinsi	Luasan (Ha)	Dokumen
1	Fasilitasi Legalisasi Tanah	1. Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara	368,25 Ha	SK HPL Nomor 1/HPL/KEM-ATR/BPN/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024
		2. Desa Kahingai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	588,26 Ha	SK HPL Nomor : 11/HPL/KEM-ATR/BPN/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024
		3. Desa Dungkean, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Selatan	133,65 Ha	Telah dilakukan pengurusan HPL Transmigrasi, saat ini dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR/BPN
		4. Desa Watutinawu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara	334,08 Ha	Telah dilakukan pengurusan HPL Transmigrasi, saat ini dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR/BPN
		<b>Jumlah</b>	<b>1.424,49 Ha</b>	

**b. 2.2 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL**

Pengurusan penerbitan Sertipikat HPL adalah Proses pendaftaran SK HPL oleh Dinas yang membidangi Transmigrasi atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Langkah yang dilakukan dalam kegiatan fasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL:

- 1) Berkoordinasi dan mendorong Dinas Transmigrasi Kabupaten untuk segera mendaftarkan SK HPL menjadi Sertipikat HPL di Kantor Pertanahan Kabupaten;
- 2) Membantu memfasilitasi dalam hal koordinasi dan konsultasi antara Dinas Transmigrasi Kabupaten dengan Kantor Pertanahan Kabupaten untuk mengetahui progress dan kendala pengurusan penerbitan sertipikat HPL Transmigrasi;

Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL, memiliki target 1.000 Ha terealisasi 1.166,83 Ha, dengan capaian 116,68%.

Tabel 3.5 Capaian IKU 2.2 Luasan Tanah Yang Difasilitasi Pengurusan Sampai Dengan Penerbitan Sertipikat HPL

No	Bidang Teknis	Keterangan		
		Lokasi/Kab/Provinsi	Luasan (Ha)	Dokumen
1	Fasilitasi Legalisasi Tanah	1. Desa Sinyoinyoi, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	73,79 Ha	Sertipikat No.10 Tahun 2024 Tanggal 19 Januari 2024
		2. Desa Sinyoinyoi, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	137,60 Ha	Sertipikat No.09 Tahun 2024 Tanggal 8 Januari 2024
		3. Desa Kahingai, Kabupaten Lamandau, Provinsi	598,66 Ha	Sertipikat No. 00005, 00006, 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00013 Tahun

No	Bidang Teknis	Keterangan		
		Lokasi/Kab/Provinsi	Luasan (Ha)	Dokumen
		Kalimantan Tengah		terbit 2024 (Tanggal 7 Agustus 2024)
		4. Desa Kanapa-Napa, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara	26,49 Ha	Sertipikat NIB. 21160000010020; 21160000010040; 21160000010050; 21160000010100; 21160000010110; 21160000010130; 21160000010140; 21160000010150; 21160000010160; 21160000010170; 21160000010180; 21160000010190; 21160000010200; 21160000010210; 21160000010220; 21160000010240 Tahun terbit 2024 (Tanggal 09 Agustus 2024)
		5. Desa Sungai Baru, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	330,29 Ha	Sertipikat NIB. 15.14.000000944.0 Tahun 2024 (14 Oktober 2024)
		<b>Jumlah</b>	<b>1.166,83 Ha</b>	

**c. IKU 2.3 Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi**

Proses Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi adalah mekanisme penyediaan tanah transmigrasi yang diperuntukan bagi pembangunan satuan permukiman pemugaran (SP-Pugar). Pada tahun 2024 tidak ada alokasi anggaran untuk konsolidasi tanah transmigrasi sehingga Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Masyarakat dan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis di Desa Bulu, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Namun agar target IKU dapat tercapai, maka kegiatan Koordinasi bersama Dinas Transmigrasi Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan tetap dilakukan sebagai langkah persiapan yaitu dengan Kegiatan Pendampingan Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi Pada Calon Lokasi SP.Pugar Di Desa Bulu Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peninjauan kesepakatan dengan masyarakat penduduk setempat dan untuk memperoleh luasan bidang tanah potensi objek konsolidasi tanah transmigrasi.

Dengan demikian realisasi fisik dapat tercapai 100% karena sudah terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan data Awal Potensi Objek Konsolidasi Tanah Transmigrasi SP.Pugar dengan kantor dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten Enrekang dengan hasil yang didapatkan:

- 1) Usulan Program Pembangunan SP Bulu Desa Bulu, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- 2) Berita Acara Komunikasi dan Informasi Calon Lokasi SP.Pugar Desa Bulu, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- 3) Data Kondisi *Existing* Desa Bulu Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- 4) Data aspek perencanaan baik RKT dan RSKP;

Tabel 3.6 Capaian IKU 2.3 Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi

No	Bidang Teknis	Keterangan	
		Lokasi/Kab/Provinsi	Dokumen
1	Fasilitasi Legalisasi Tanah	Desa Bulu, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil Kegiatan Pendampingan Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi Pada Calon Lokasi Sp Pugar Di Desa Bulu, Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan

### **3. Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian (lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

#### **a. IKU 3.1 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)**

Rencana program/kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan hasil koordinasi dengan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk percepatan pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dokumen rencana perwujudan kawasan transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).

Pada tahun 2024 tidak tersedia alokasi anggaran untuk indikator kinerja utama ini, namun kegiatan Koordinasi dengan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target IKU dengan beberapa kegiatan antara lain:

#### **1) Koordinasi Perpanjangan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) yang diselenggarakan oleh Ditjen PEID dengan Dit. P2KT**

Dilakukan dalam rangka tindaklanjut proses permohonan Ijin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) oleh Badan Usaha, untuk tahapan tinjau lokasi di Kawasan Transmigrasi guna mendapatkan rekomendasi *clear and clean* atas tanah HPL Transmigrasi. Kegiatan ini diampu oleh Ditjen PEID, dengan kerja sama dalam bentuk koordinasi untuk permintaan dukungan personel dari Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan koordinasi ini sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dan berlanjut pada tahun 2024 dengan pencermatan tinjau lapang Permohonan IPT di Kawasan Transmigrasi lainnya.

## **2) Kelompok Kerja Forum Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024**

Kelompok kerja ini melibatkan Pusdatin sebagai Wali Data dan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagai Produsen Data. Adapun koordinasi kegiatan yang dilakukan adalah:

- a) Pembahasan Spesifikasi/Standar Produk Data Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000 dan Sebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000;
- b) Koordinasi penyusunan draf Data Standar/Spesifikasi Data dan penyusunan kode referensi untuk Data Sebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000;
- c) Koordinasi analisis lanjutan dengan produsen data spasial data Sebaran Lokasi Transmigrasi skala 1: 50.000 dalam penyusunan rencana/desain pemanfaatan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia dengan Kementerian Desa PDTT;
- d) Disahkan dokumen Standar/Spesifikasi Data dan penyusunan kode referensi untuk Data Sebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000, dalam bentuk SK Kepdirjen Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Standar Data Informasi Geospasial Sebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000.

## **3) Koordinasi Kegiatan Pencermatan 45 Kawasan Transmigrasi**

Koordinasi Kegiatan yang dilaksanakan adalah pencermatan terhadap Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), Rencana Studi Kawasan Pengembangan (RSKP), Legalitas Tanah, Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Rencana Pengembangan Masyarakat (Rembangmas). Data yang dihasilkan adalah data hasil pencermatan 45 kawasan transmigrasi terhadap data di Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan berasal dari mengumpulkan data-data dan koordinasi dengan UKE II lain, seperti Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Direktorat

Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta dengan UKE I lainnya yaitu Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan demikian, target Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) tetap terealisasi 100% dengan kegiatan Kerjasama dan koordinasi antara UKE 1 lainnya dalam bidang ketransmigrasian.

**b. IKU 3.2 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)**

Kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M adalah jumlah rencana, program, dan anggaran K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen kegiatan K/L/D/M yang bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi sesuai dengan dokumen rencana perwujudan Kawasan transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi. Pada tahun 2024 IKU ini telah melaksanakan program/kegiatan yang bekerjasama dengan pihak eksternal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan realisasi 100% antara lain:

**1) Pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan pembentukan Komite Teknis Perumus SNI**

Standarisasi harus menjadi Ikonik karena tiap UMKM harus ada barang yang menonjol dan tidak boleh gagal sehingga UMKM harus memiliki *backup* modal dengan harapan kedepan akan dibuat Ekosistem secara Global tanpa mengikuti sistem Kapitalis. Dasar hukum pelaksanaan standardisasi adalah UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

serta PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. SNI G2RT untuk mengetahui apakah telah memenuhi standar maka harus dilakukan pengujian. Untuk itu perlu ditentukan siapa yang akan dinilai serta apa yang akan dinilai. Produk G2RT harus memiliki Standar Mutu dalam mekanisme kegiatannya, dalam hal ini BSN dapat membantu dalam pemenuhan Standar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dilakukan kerja sama kegiatan G2RT yang melibatkan Akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai fasilitator, sebagai berikut:

- a) Proses pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan pembentukan Komite Teknis Perumus SNI;
- b) Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menindaklanjuti usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan pembentukan Komite Teknis Perumus SNI dengan menyampaikan surat balasan dengan melampirkan briefing paper;
- c) Ditetapkannya Komite Teknis Manajemen Ekonomi Kolaboratif beserta keanggotaannya, dan ditetapkannya Program Nasional Perumusan Standar Mendesak (PNPS Mendesak) Tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN);
- d) Komite Teknis Manajemen Ekonomi Kolaboratif telah mengadakan Rapat Penyusunan Konsep Akhir Rancangan SNI G2RT atau RSNI1;
- e) Rapat Teknis Rancangan SNI G2RT atau RSNI2 untuk mencapai kesepakatan teknis.

## **2) Percepatan Kemandirian Masyarakat Melalui Optimalisasi Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Jagung di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur**

Kegiatan ini merupakan program Program Dana Padanan (PDP) Batch 2 dan VOKASI Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi. Dalam kegiatan ini yang menjadi mitra utama adalah Kementerian Desa PDTT yang bertujuan melakukan Percepatan Kemandirian Masyarakat Transmigran Melalui

Optimalisasi Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Jagung di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur.

Penerima manfaat dari program ini yaitu masyarakat transmigran, tetapi terdapat pihak lain yang juga akan mendapat manfaat diantaranya mahasiswa, dosen, pemerintah. Bagi mahasiswa, program ini menjadi jembatan untuk pelaksanaan program MBKM dan mendapatkan pengalaman diluar kampus. Bagi dosen, program ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, selain itu hasil kerja dosen juga akan digunakan oleh masyarakat luas. Bagi pemerintah, program ini dapat mendukung pelaksanaan program yang telah direncanakan sehingga diharapkan dapat melebihi target yang diinginkan. Berikut tahapan yang telah dilakukan:

- a) Mengikuti Proses Verifikasi dan Evaluasi kelayakan anggaran dan program oleh Kemenristekdikti;
- b) Pengumuman hasil dari Verifikasi dan evaluasi Kelayakan Anggaran dan Program, yang menyatakan akan memberikan pendanaan melalui Program Dana Padanan Tahun Anggaran 2024 Batch 2;
- c) Mempersiapkan draft kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Universitas Brawijaya sebagai tindaklanjut dari pendanaan kegiatan;
- d) Perjanjian Kerja Bersama dan Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Universitas Brawijaya, sebagai salah satu persyaratan pencairan dana dari Program Dana Padanan Tahun Anggaran 2024 Batch 2;
- e) Dilaksanakan Uji coba penanaman jagung Raja R7 seluas 1 Ha di Kapitan Meo, Kawasan Transmigrasi Kobalilma Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT;
- f) Dilaksanakan penanaman jagung setelah panen di demplot. Serta telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama dengan Kemendikbudristek.

### **3) Koordinasi tindak lanjut kerja sama TNI AD dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia**

Rapat koordinasi ini yaitu membahas kerja sama TNI AD dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang transmigrasi di Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini menjadi strategi pengelolaan permasalahan perbatasan negara dengan menempatkan TNI AD di daerah-daerah perbatasan Indonesia-Malaysia disertai pembangunan infrastruktur, keamanan dan kesejahteraan Masyarakat dalam rangka mewujudkan pengembangan transmigrasi di daerah perbatasan Kalimantan-Malaysia.

Kawasan transmigrasi di daerah perbatasan yang akan dilakukan pengamatan potensi permukiman lebih lanjut yaitu Kawasan Gerbang Masperkasa, Kawasan Jagoi Babang, Kawasan Sekayam-Entikong, Kawasan Ketungau Hulu, Kawasan Mentebah Dan Kawasan Seimenggaris.

Pembahasan tentang kerja sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan TNI AD akan diagendakan lebih lanjut.

## **4. Meningkatkan kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi**

### **a. IKU 4.1 Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan**

Kebijakan dan regulasi perencanaan perwujudan Kawasan transmigrasi merupakan arahan kebijakan Kementerian serta pedoman pelaksanaan perencanaan perwujudan Kawasan transmigrasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kebijakan dan regulasi perencanaan perwujudan Kawasan transmigrasi, yang telah selesai disusun pada tahun 2024 dengan menghasilkan *output* 3 (tiga) Kebijakan dan Regulasi yaitu:

- 1) Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru, telah dilaksanakan melalui tahapan:
  - a) Rapat persiapan dan rapat pendahuluan;

- b) Studi lapang ke Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat untuk pengecekan lokasi Kawasan Transmigrasi dan melakukan FGD dengan transmigran;
  - c) Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat KPB;
  - d) Tersusunnya Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat KPB.
- 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, telah dilaksanakan melalui tahapan:
- a) Rapat Persiapan Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi;
  - b) Studi lapang untuk pengecekan lokasi Kawasan Transmigrasi dan melakukan FGD dengan transmigran;
  - c) Rapat Penyusunan Laporan Antara Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi;
  - d) Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi;
  - e) Tersusunnya Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
- 3) Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Umum, telah selesai melalui tahapan:
- a) Rapat Persiapan Reviu SOP;
  - b) Identifikasi Reviu SOP;
  - c) Penyusunan Reviu SOP;
  - d) Verifikasi Reviu SOP;
  - e) Hasil Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Umum.
- 4) Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Pemerintah, Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan, telah selesai melalui tahapan:
- 5) Rapat Persiapan Reviu SOP;
  - 6) Identifikasi Reviu SOP;
  - 7) Penyusunan Reviu SOP;

- 8) Verifikasi Reviu SOP;
- 9) Hasil Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Pemerintah, Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.

Tabel 3.7 IKU 4.1 Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

	Bidang Teknis	Regulasi dan Kebijakan	Realisasi	Capaian
4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan			
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru</li> <li>2. Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi</li> </ol>	4	100%
	Fasilitasi Legalisasi Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Umum</li> <li>4. Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Pemerintah, Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan</li> </ol>		

Kebijakan dan regulasi yang telah disusun tersebut mempunyai dampak kegunaan dan manfaat yang akan digunakan oleh pihak lain dalam bidang ketransmigrasian, yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Penggunaan Kebijakan dan Regulasi (NSPK)

No	Nama Kebijakan & Regulasi (NSPK)	Pengguna NSPK	Tujuan/Keterkaitan/Manfaat Oleh Pengguna
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru	Kementerian/Lembaga/Daerah	Memberikan acuan atau pedoman untuk menyusun Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru dan memiliki standarisasi kedalaman substansi yang sama dalam penyusunan dokumen Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru

No	Nama Kebijakan & Regulasi (NSPK)	Pengguna NSPK	Tujuan/Keterkaitan/Manfaat Oleh Pengguna
			masyarakat di kawasan transmigrasi
2	Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Kementerian/Lembaga/Daerah	Memberikan acuan atau pedoman untuk menyusun rencana pengembangan masyarakat Kawasan Transmigrasi dan memiliki standarisasi kedalaman substansi yang sama dalam penyusunan dokumen rencana pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi
3	Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Umum	Lingkup Ditjen PPKTrans, UKE II terkait perencanaan Teknis, Provinsi/ Kabupaten, Tenaga Ahli	Merupakan acuan pelaksanaan pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Ditjen PPKTrans
4	Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Pemerintah, Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan	Lingkup Ditjen PPKTrans, UKE II terkait perencanaan Teknis, Provinsi/ Kabupaten	Merupakan acuan pelaksanaan pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Pemerintah, Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Ditjen PPKTrans

## 5. terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

### a. IKU 5.1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama ini merupakan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, yang merupakan penggabungan temuan dari SOTK sebelumnya yaitu Dit. P3KT, Dit. PBKT, dan Dit. PTT. Progres atas temuan hasil pemeriksaan oleh BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 41,82% dari total nominal rekomendasi sebesar Rp.884.414.422,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah). Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, belum

dilakukan pemilahan butir temuan sampai dengan level eselon II. Secara rinci, tindak lanjut atas temuan ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Realisasi Tindak Lanjut LHP BPK Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

NO	LHP	JUMLAH TEMUAN		TINDAK LANJUT		SISA TEMUAN	
			(Rp)		(Rp)		(Rp)
1	TAHUN ANGGARAN 2017 - LHP.80C/HP/XVI/05/2018						
	1) Tunkin	39 butir	24,523,656	36 butir	20,904,520	3 butir	3,619,136
	2) Belanja Barang dan Jasa	259 butir	252,846,910	22 butir	35,555,300	237 butir	217,291,610
	3) Paket Meeting, Perdin Biasa dan RDK						
	-DIT. P3KT	40 butir	96,618,099	10 butir	23,347,200	30 butir	73,270,899
	-DIT. BPKT	44 butir	214,197,049	11 butir	67,177,301	33 butir	147,019,748
	4) Lembur						
	-DIT. P3KT	42 butir	173,842,926	2 butir	61,118,277	40 butir	112,724,649
	-DIT. BPKT	50 butir	216,629,747	13 butir	98,156,249	37 butir	118,473,498
	-DIT. PTT	38 butir	183,126,601	11 butir	120,062,051	27 butir	63,064,550
	Jumlah		884,414,422		369,861,078		514,553,344
					41.82%		
2	TAHUN ANGGARAN 2018						
	1) RDK	46 butir	35,129,000	46 butir	35,129,000	0 butir	0
3	TAHUN ANGGARAN 2019 - Konsep LHP BPK TP. II Hal 11.1 s/d 11.4						
	1) Tunkin	24 butir	1,619,047	24 butir	1,619,047	0 butir	0
4	TAHUN ANGGARAN 2020						
			0		0		0
5	TAHUN ANGGARAN 2021						
			0		0		0
6	TAHUN ANGGARAN 2022 - Konsep LHP BPK Halaman TP. 30.1						
	1) PPh 23 Kegiatan Paket Meeting	5 butir	2,223,080	4 butir	2,223,080	1 butir	-

Dari tabel diatas terlihat tindak lanjut temuan terealisasi sebesar Rp.369.861.078,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Adapun upaya yang telah dilakukan untuk memacu terselesaikannya indikator kinerja utama ini yaitu dengan membentuk Tim TPKN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Sedangkan untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Layanan Ketatausahaan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian Direktorat	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Layanan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Direktorat	12 Bulan	12 Bulan	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa kedua indikator kinerja utama Subbagian Tata Usaha Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi tercapai realiasi 100% sesuai target yang ditentukan, dengan hasil:

1. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian Direktorat dengan target 12 bulan, yang telah dilaksanakan meliputi:
  - a. Laporan Kegiatan Direktorat yang disusun secara bulanan, triwulan dan tahunan seperti, Program Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Kegiatan Tahunan, Laporan Kinerja Tahunan, Pengisian pengelolaan kinerja pada aplikasi (E-SAKIP, E-MONNEV, SAKTI, SMART DJA, SIRUP). Selanjutnya administrasi pengelolaan Keuangan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menghasilkan Data *Monthly Audit*, Dokumen SPJ kegiatan Dit. P2KT, BAST dan BAP Dokumen Pengadaan, Laporan *Weekly Report*, dan Laporan Keuangan Tahunan.
  - b. Laporan Pembinaan Kepegawaian Direktorat yang disusun secara rutin maupun *conditional* seperti Laporan Rekapitulasi Daftar Kehadiran Pegawai Dit. P2KT, Laporan Kinerja Bulanan ASN dan Non ASN, Laporan SKP ASN melalui Aplikasi E-Kinerja, Laporan Evaluasi Kinerja PPNPN, Daftar Cuti ASN dan Non ASN, Usulan Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Pengembangan Karir Pegawai, Rencana Usulan Kenaikan Pangkat, Daftar

Nominatif Pegawai ASN Dit. P2KT, dan Daftar Dosir Pegawai ASN *Hard* maupun *Soft File*.

2. Layanan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Direktorat dengan target 12 bulan, yang telah dilaksanakan meliputi tersedianya Formulir Permintaan dan Pengeluaran ATK dan *Computer Supply* Dit. P2KT, tersedianya Layanan Persuratan dan Kearsipan yaitu Daftar Arsip Dit. P2KT, Tersedianya Daftar Inventarisasi BMN Direktorat yaitu Laporan Barang Milik Negara Semester I dan II, dan tersedianya Layanan Pimpinan yaitu Laporan Perjalanan Dinas Pimpinan.

## **A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya lebih menekankan kepada fungsi "*steering*". Fungsi *steering* menghasilkan *output* yang mengarah kepada kebijakan dan pedoman bagi aparatur di daerah dalam mengimplementasikan perencanaan pengembangan potensi sumberdaya kawasan yang terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia kawasan, disamping sebagai fasilitator dalam melaksanakan penyusunan Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang dalam prosesnya harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP), memastikan lahan Transmigrasi yang akan diberikan kepada masyarakat sudah memenuhi kriteria 2 C yaitu *Clear* (jelas letak, luas dan batas) dan *Clean* (bersih dari peruntukan penggunaan lain, tidak masuk dalam kawasan hutan) serta mengakomodir aspirasi masyarakat dengan melakukan pendekatan aspek biofisik, sosial budaya dan ekonomi secara sistematis, holistik dan komprehensif.

Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang berkualitas sangat diperlukan sebagai input untuk mewujudkan permukiman yang memiliki tiga

layak dan berkelanjutan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan koordinasi dan sinkronisasi serta ketajaman analisis kebutuhan dari setiap *stakeholder* yang terlibat.

Untuk melihat perbandingan kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, dapat melihat sandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dituangkan pada tabel perbandingan di bawah:

Tabel 3.11 RPJMN Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Sasaran	Target Per Tahun					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tersedianya dokumen rencanateknis perwujudan kawasan transmigrasi dan pengembangan Masyarakat	Jumah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang ditetapkan		6	6	6	6	Dokumen
2.	Tersedianya dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran		50%	50%	50%	50%	Persentase
3.	Tersedianya tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL		5.000	5.000	5.000	5.000	Hekta (Ha)
4.		Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi		500	500	500	500	Hekta (Ha)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Sasaran	Target Per Tahun					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Terukurnya perkembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi		52	52	52	52	Dokumen
6.	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)		70%	75%	80%	85%	Persentase
7.		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)		60%	65%	70%	75%	Persentase

Pada tahun 2022 telah dilakukan pembahasan reviu Indikator Kinerja Utama, yang berdampak juga terhadap Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Hal ini mendukung

perubahan narasi maupun target Indikator Kinerja Utama Dit. P2KT, serta beberapa UKE II yang juga mengalami perubahan atau penyesuaian IKU sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024.

Beberapa indikator kinerja utama pada tahun 2022 yang diajukan reviu karena bukan merupakan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yaitu:

**1. Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi**

Pada indikator kinerja utama ini tidak ada capaian, karena terkait tugas dan fungsi kegiatan tersebut lebih tepatnya berada pada Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

**2. Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), dan Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)**

Kedua indikator kinerja utama tersebut merupakan bagian tugas dan fungsi dari Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait RKT.

Sedangkan indikator kinerja utama pada tahun 2023 ada penambahan IKU dan perubahan narasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yaitu:

1. IKU 1.1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan;
2. IKU 1.2 Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan;

3. IKU 2.1 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL;
4. IKU 2.2 Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL;
5. IKU 2.3 Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi;
6. IKU 3.1 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT);
7. IKU 3.2 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT);
8. IKU 4.1 Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan.

Berikut merupakan perbandingan indikator kinerja utama yang berdasarkan RPJMN 2020-2024 dengan indikator kinerja utama yang berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024.

Tabel 3.12 Perbandingan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan Kepmendesa Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024

IKU BERDASARKAN RPJMN 2020-2024		IKU BERDASARKAN KEPMEDESA NOMOR 266 TAHUN 2023	
Sasaran Kegiatan	IKU	Sasaran Kegiatan	IKU
Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
			Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
Tersedianya tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL
			Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL
	Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi		Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi
Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian (lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)
	Persentase afirmasi rencana		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M

IKU BERDASARKAN RPJMN 2020-2024		IKU BERDASARKAN KEPMENDESA NOMOR 266 TAHUN 2023	
Sasaran Kegiatan	IKU	Sasaran Kegiatan	IKU
	program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)		yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)
		Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan telah adanya perubahan indikator kinerja utama, sehingga terlihat perbandingan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

RPJMN 2020-2024			Indikator Kinerja Utama 2022-2024				
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	6 Dok	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%
				Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%

RPJMN 2020-2024			Indikator Kinerja Utama 2022-2024				
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Tersedianya tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	5.000	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000 Ha	1.424,49 Ha	142,45%
				Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000 Ha	1.166,83 Ha	116,68%
	Jumlah dan luasan bidang tanah dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500 Ha		Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500 Ha	500 Ha	100%
Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	85%	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian (lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	80%	80%	100%

RPJMN 2020-2024			Indikator Kinerja Utama 2022-2024				
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
				(RKT)			
	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	75%		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	75%	75%	100%
			Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	4 Kebijakan & Regulasi	4 Kebijakan & Regulasi	100%

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mengetahui pencapaian kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, diinformasikan juga sandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja tahun anggaran sebelumnya, sebagai gambaran kenaikan/penurunan kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2023.

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja tahun anggaran 2024 dengan realisasi kinerja tahun anggaran 2023

TA 2023				TA 2024				
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	T	R	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	T	R	Capaian (%)
Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%
	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok		Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3 Dok	3 Dok	100%
Tersedianya tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000 Ha	1.527,25 Ha	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000 Ha	1.424,49 Ha	142,45%
	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000 Ha	1.018,41 Ha		Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000 Ha	1.166,83 Ha	116,68%
	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500 Ha	500 Ha		Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500 Ha	500 Ha	100%
Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian (lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	75%	75 %	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian (lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	80%	80%	100%

TA 2023				TA 2024				
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	T	R	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	T	R	Capaian (%)
dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)			dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)			
	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	70%	70 %		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	75%	75%	100%
Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	6 Kebijakan & Regulasi	7 Kebijakan & Regulasi	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	4 Kebijakan & Regulasi	4 Kebijakan & Regulasi	100%
Terselesaikannya tindak lanjut temuan	Persentase rekomendasi hasil	72%	39,57%	Terselesaikannya tindak lanjut temuan	Persentase rekomendasi hasil	73%	41,82%	41,82%

TA 2023				TA 2024				
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	T	R	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	T	R	Capaian (%)
hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti			hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti			

Dari tabel diatas indikator kinerja utama untuk capaian kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi telah sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024. Terlihat realisasi kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024 secara keseluruhan tercapai sesuai target bahkan ada yang melampaui target yang ditentukan. Hanya indikator kinerja utama "Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti" masih belum tercapai target, karena masih terus berlanjut proses TLHP dari tahun ke tahun, namun mengalami kenaikan progress pada tahun 2024.

#### **A.4. Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2024**

Dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di perjanjikan (PK), tidak terlepas dari keberhasilan dan permasalahan yang dapat dikarenakan faktor permasalahan dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Beberapa permasalahan yang terjadi selama tahun 2024 dalam pencapaian kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, yaitu:

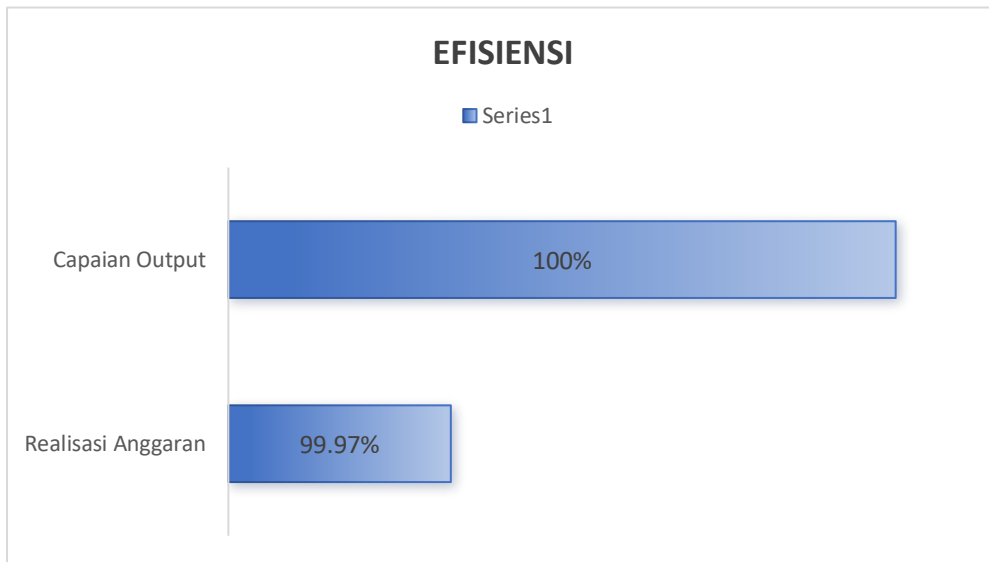
1. Tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:
  - a. Indikator kinerja utama "Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi" tidak dapat dilaksanakan

secara penuh karena tidak adanya alokasi anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan turun lapang dalam bentuk Bimbingan Masyarakat dan Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis di Desa Bulu, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan output dari IKU tersebut. Namun kendala ini dapat diatasi dengan tetap dilakukannya Koordinasi dan Pengumpulan data Awal Potensi Objek Konsolidasi Tanah Transmigrasi SP.Pugar dengan kantor dinas yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten Enrekang.

- b. Kegiatan Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut, namun Kerja sama internal tetap bisa dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara UKE 1 lainnya dengan pendanaan yang berada pada UKE 1 pengampu kegiatan tersebut.
2. Pergantian Pejabat di Pemerintah Daerah pada bidang ketransmigrasian menyebabkan belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
3. Progres pengurusan dan pengusulan HPL Transmigrasi yang masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kanwil BPN Provinsi belum dapat ditindaklanjuti dengan pengukuran kadastral maupun risalah penelitian tanah dikarenakan anggaran kegiatan tersebut belum teralokasi oleh ATR/BPN;
4. Kendala dalam upaya penagihan untuk menyelesaikan proses TLHP kepada pihak ketiga yang memiliki temuan dikarenakan penyedia yang tidak lagi beroperasi dan pemiliknya telah meninggal;
5. Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum memadai sesuai dengan bidang tugas perencanaan perwujudan Kawasan transmigrasi;
6. Dukungan sarana dan prasarana yang masih belum memadai (PC, Scanner, Drone dan Laptop).

### A.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Penggunaan anggaran dikatakan efisiensi apabila nilai *output* lebih besar dari pada *input*, tergambar pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

### A.6. program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja, ditunjang dengan keberhasilan implementasi kegiatan – kegiatan yang di implementasikan oleh unit kerja. Di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Perencanaan Kawasan Transmigrasi selama tahun anggaran 2024 untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja sesuai target kinerja yang telah di perjanjikan:

Tabel 3.15 Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dalam rangka Mendukung Konsep Transpolitan</li> <li>• Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Transmigrasi Di Perbatasan Negara Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat</li> <li>• Monitoring &amp; Pendampingan RTSP-RT Pusat SKP</li> <li>• Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi</li> </ul>
		Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarifikasi, Koordinasi dan Evaluasi Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB</li> <li>• Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang</li> <li>• Klarifikasi Bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat</li> <li>• Updating Data Sipukat</li> <li>• Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi</li> </ul>
2	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pelepasan Kawasan Hutan</li> <li>• Fasilitasi Pengurusan HPL Transmigrasi</li> </ul>
		Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pelepasan Kawasan Hutan</li> <li>• Fasilitasi Pengurusan HPL Transmigrasi</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
		Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pelepasan Kawasan Hutan</li> </ul>
3	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian (lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Rencana Program/Kegiatan unit kerja internal di Kawasan Transmigrasi</li> </ul>
		Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Rencana Program/Kegiatan Lintas Sektor di Kawasan Transmigrasi</li> </ul>
4	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru</li> <li>• Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi</li> <li>• Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Umum</li> <li>• SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
			Pemerintah, Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan

## B. REALISASI ANGGARAN

### B.1. Realisasi anggaran per Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan penyerapan anggaran adalah jumlah dari pagu belanja yang direalisasikan oleh pengguna anggaran belanja. Untuk melaksanakan program/kegiatan, alokasi anggaran pada DIPA Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi sebesar Rp.4.259.822.000 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), karena terdapat penambahan anggaran sebesar 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan pemblokiran sebesar 405.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Berikut realisasi anggaran per Indikator Kinerja Utama dengan rincian:

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja Utama	PAGU	Realisasi
1.1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	1.297.440.000	1.050.854.741
1.2 Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	1.297.440.000	1.050.854.741
2.1 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	425.000.000	285.447.567
2.2 Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	425.000.000	285.447.567

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>PAGU</b>	<b>Realisasi</b>
2.3 Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	-	-
3.1 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	-	-
3.2 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	526.522.000	412.526.458
4.1 Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	288.420.000	287.606.797

Dari tabel tersebut ada 2 (dua) indikator kinerja utama yang tidak tersedia alokasi anggaran yaitu IKU 2.3 Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi dan IKU 3.1 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).

## B.2. REALISASI ANGGARAN PUSAT

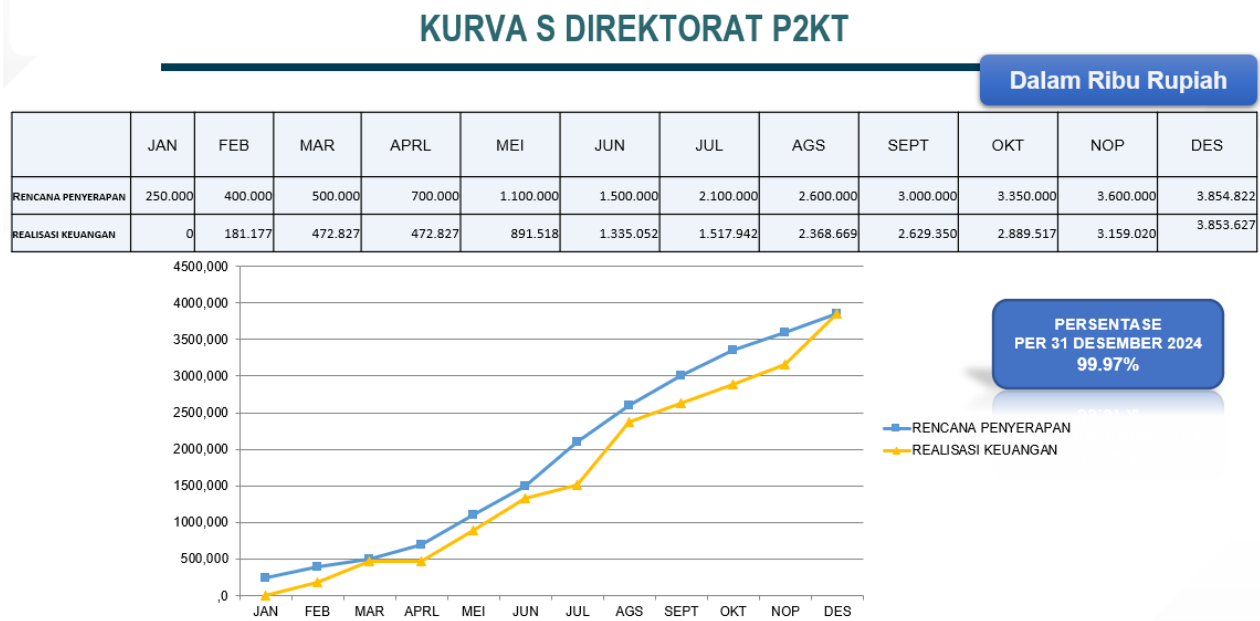
Realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 hanya terdapat di Pusat, dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Penganggaran Tahun 2024 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

UKE II	Penyerapan Anggaran		Kinerja Penganggaran		
	Pagu	Realisasi	Penyerapan	Capaian Keluaran	Efisiensi
	Rp,-	Rp,- %	%	%	%
Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	3.854.822.000	3.853.627.540	99,97	100	0,03

Dari tabel tersebut penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2024 menggunakan Pagu tanpa blokir sebesar Rp.3.854.822.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.3.853.627.540 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).

Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Kurva S Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Januari Sampai Dengan Desember 2024

## **C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

Capaian kinerja lainnya pada Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi selama Tahun 2024, sebagai berikut:

### **1. Pembangunan Zona Integritas Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi**

- a. Tahun 2024 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi melanjutkan mengikuti Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor Nomor Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Internal Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024.
- b. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, telah dibentuk Tim Internal Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari 6 area perubahan yaitu:
  - 1) Manajemen Perubahan indikator:
    - a) Penyusunan Tim Kerja
    - b) Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
    - c) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
    - d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  - 2) Penataan Tata Laksana indikator:
    - a) Prosedur Operasional tetap Pelayanan

- b) *E-Office/ e-government*
- c) Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia indikator:
  - a) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
  - b) Pola Mutasi Internal
  - c) Penetapan Kinerja Individu
  - d) Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja indikator:
  - a) Keterlibatan Pimpinan
  - b) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja
- 5) Penguatan Pengawasan indikator:
  - a) Pengendalian Gratifikasi
  - b) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Pengukuran
  - c) Pengaduan Masyarakat
  - d) *Whistle Blowing System*
  - e) Penanganan Benturan Kepentingan
- 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik indikator:
  - a) Standar Pelayanan
  - b) Budaya Pelayanan Prima
  - c) Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
- c. Tahapan yang telah dilalui Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu:
  - 1) Melakukan pencermatan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
  - 2) Melengkapi Evidence LKE Zona Integritas sebagai Dokumen atau Data Pendukung dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas

(PMPZI) Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

- 3) Penilaian LKE Pelaksanaan Zona Integritas oleh dan Tim Penilai Mandiri Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan dilanjutkan oleh Tim Penilai Internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
- 4) Melaksanakan Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan melalui Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP) dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Survei dilakukan sebanyak 3 periode dalam 1 (satu) tahun dengan hasil:
  - a) Survei Pertama, Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP) 84,00% predikat A (sangat baik) dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 91,50% predikat A (sangat baik);
  - b) Survei Kedua, Survei Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPPK) 92,58% predikat A (sangat baik) dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 95,08% predikat A (sangat baik);
  - c) Survei Ketiga, Survei Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPPK) 92,19% predikat A (sangat baik) dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 94,25% predikat A (sangat baik);
- 5) Survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP) dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan survei yang dilakukan pada area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan penilaian terhadap aplikasi SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi) yang dimiliki oleh Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi.
- 6) Keterkaitan Pembangunan Zona Integritas dengan isu strategis unit kerja yaitu :
  - a) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi telah melakukan inovasi data ketransmigrasian secara digital sesuai dengan *one map policy* secara lengkap dan akurat;

- b) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi telah melakukan inovasi dengan menggunakan digital data transmigrasi baik secara *online* maupun *offline*.
- 7) Setelah melalui beberapa tahapan, berdasarkan hasil penilaian Kementerian PANRB Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi maju ke tahap selanjutnya untuk mengikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dalam bentuk paparan dan wawancara bersama Tim Evaluator Zona Integritas Kementerian PANRB pada tanggal 10 Oktober 2024. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2024 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi mendapat kunjungan verifikasi lapangan dari Tim Evaluator Zona Integritas Kementerian PANRB. Namun pada pengumuman hasil akhir Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi belum berhasil mendapatkan gelar Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

## **2. Media Informasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Transpolitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

- a. Penyusunan Media Informasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Transpolitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah dilaksanakan mulai Tahun 2021, yang sebelumnya berbentuk Jurnal Perencanaan Teknis Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Kemudian pada tahun 2022 kegiatan ini terus berlanjut dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak internal maupun eksternal di bidang ketransmigrasian, sehingga berkembang dan dikenal menjadi "Majalah Transpolitan" yang sudah berjalan sampai Tahun 2024.
- b. Media Informasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Transpolitan menyajikan data dan informasi di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi, pelaksanaan program ketransmigrasian, dan penyelenggaraan kegiatan ketransmigrasian. Media Informasi ini disusun oleh Tim Penyusun yang

terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Anggota beserta dengan tugas dan tanggungjawab yang ditentukan.

- c. Media Informasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Transpolitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berisikan materi/tulisan yang berasal dari para pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Akademisi, Kementerian/Lembaga Pemerintah, maupun Pihak Swasta. Pada Tahun 2024 "Majalah Transpolitan" diterbitkan sebanyak 3 edisi dan telah terdaftar ISSN melalui BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dengan mengangkat tema:
- 1) Edisi Pertama, terbit bulan Juni 2024 bertema "Transformasi Transmigrasi";
  - 2) Edisi Kedua, terbit bulan September 2024 bertema "Keterpaduan Perencanaan Desa dengan Transmigrasi";
  - 3) Edisi Ketiga, terbit bulan Desember 2024 bertema "Transmigrasi untuk Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa".

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Realisasi kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 tercapai 100%. Untuk pagu anggaran yang ditetapkan terdapat pagu dengan blokir dan tanpa blokir. Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja adalah sebesar Rp.3.853.627.540 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) atau mencapai persentase 99,97% dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.854.822.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
2. Adanya kebijakan blokir anggaran di tahun 2024 menyebabkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dibuka blokir anggaran;
3. Beberapa kegiatan yang tidak ada alokasi anggaran, dapat didukung dengan kegiatan penunjang lainnya, sehingga target tetap bisa terealisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
4. Adanya kendala/keterbatasan, tidak menyurutkan semangat jajaran Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan kinerja yang optimal.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan atas capaian kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah yang diambil antara lain:

1. Dibutuhkan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM di lapangan dan kemampuan teknis tentang SAKIP, dalam mendukung pengelolaan kinerja sehingga dapat mewujudkan laporan yang akuntabel;
2. Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi akan pentingnya penerapan SAKIP

agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai ketentuan;

3. Perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan dibidang ketrasmigrasian;
4. Kegiatan perencanaan, evaluasi dan monitoring agar menjadi perhatian untuk pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun anggaran selanjutnya, dapat diidentifikasi kendala/hambatan dan ditemukan solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024 ini disusun. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi di tahun yang akan datang.

Direktur Perencanaan Perwujudan  
Kawasan Transmigrasi,



La Ode Muhajirin, S.IP., M.Si  
NIP. 19720703 199101 1 001

# LAMPPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2024**

**DIREKTUR  
PERENCANAAN PERWUJUDAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI**

**La Ode Muhajirin, S.IP., M.Si  
NIP. 19720703 199101 1 001**

**KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**

**Talenta Patricia Span, S.T.  
NIP. 19961108 201903 2 006**

**1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :**

- Jabatan Fungsional Ahli Madya
- Jabatan Fungsional Ahli Muda
- Jabatan Fungsional Ahli Pertama
- Jabatan Fungsional Terampil

**2. PELAKSANA**

**3. PPNPN**

**( TP, PB Admin, OB dan Driver)**

**DATA KEPEGAWAIAN**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, GOLONGAN, JABATAN, JENIS KELAMIN, AGAMA**  
**POSISI : DESEMBER 2024**

NO	Bagian	Tingkat Pendidikan							Golongan					Jenis Kelamin			Agama						
		SD	SLTP	SLTA	D3	SI	S2	S3	Jml	I	II	III	IV	Jml	L	P	Jml	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jml
1	Sub. Bagian Tata Usaha	-	-		2	4	1		7		1	5	1	7	4	3	7	6	-	1	-	-	7
2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB	-	-	-	-	2	2	-	4	-	-	3	1	4	2	2	4	3	1	-	-	-	4
3	Fasilitasi Legalisasi Tanah	-	-	0	-	3	1	-	4	-	-	4	-	4	2	2	4	4	-	-	-	-	4
4	Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	-	-	0	-	6	3	-	9	-	-	8	1	9	5	4	9	6	3	-	-	-	9
5	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	-	-	0	-	7	3	0	10	-	-	9	1	10	3	7	10	10	-	-	-	-	10
	Jumlah	0	0	0	2	22	10	0	34	0	1	29	4	34	16	18	34	29	4	1	0	0	34

**DATA PPNPN DAN PRAMUBAKTI**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN, AGAMA**  
**POSISI : DESEMBER 2024**

NO	Bagian	PPNPN							PRAMUBAKTI							PPNPN & PRAMUBAKTI			Agama							
		SD	SLTP	SLTA	D3	SI	S2	S3	Jml	SD	SLTP	SLTA	D3	SI	S2	S3	Jml	L	P	Jml	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Jml
1	Sub. Bagian Tata Usaha	-	-	-	-	9	-	-	9	-	1	4	1	3	-	-	9	12	6	18	17	1	-	-	-	18
2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	5	-	-	-	-	5
3	Fasilitasi Legalisasi Tanah	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	5	5	-	-	-	-	5
4	Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
5	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	2
	Jumlah	0	0	0	0	18	0	0	18	0	1	4	2	6	0	0	13	20	11	31	30	1	0	0	0	31



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **La Ode Muhajirin**, Jabatan **Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Juni 2024

Menyaksikan :  
Direktur Jenderal Pembangunan,  
dan Pengembangan Kawasan  
Transmigrasi

**Danton Ginting Munthe**

Pembuat Pernyataan

**La Ode Muhajirin**



**PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN, DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Muhajirin

Jabatan : Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Danton Ginting Munthe

Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2024

Pihak Kedua,

**Danton Ginting Munthe**

Pihak Pertama,

**La Ode Muhajirin**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI**

**A. Sasaran Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya dokumen rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi	1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
		1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	3	Dokumen
2	Tersedianya tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	2.1	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.2	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL	1.000	Hektar (Ha)
		2.3	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi	500	Hektar (Ha)
3	Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Kementerian ( lintas K/L/D/M) dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.1	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	80	Persen (%)
		3.2	Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	75	Persen (%)
4	Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	4	Kebijakan & Regulasi
5	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	5.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen (%)

**B. Program dan Anggaran**

No	Program	Anggaran
1.	Program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi	Rp 3.559.822.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

**Pihak Kedua,**



**Danton Ginting Munthe**

Jakarta, Juni 2024

**Pihak Pertama,**



**La Ode Muhajirin**

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL		
(1)	(2)	(3)	(4)	-	-	-	-	90,46%	9,54%
6471	DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI			4.259.822.000	44.151.963	99.999.686	464.124.069	3.853.627.540	406.194.460
6471.PBP.001	Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi			Rekomendasi Kebijakan 3.121.402.000	44.151.963	99.352.686	210.244.669	2.741.076.209	380.325.791
051	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB			904.732.000	-	30.432.246	14.922.000	879.682.609	25.049.391
A	Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB			240.261.400	-	30.432.246	14.922.000	215.223.309	25.038.091
521211	Belanja Bahan			22.213.400	-	4.206.500	-	22.180.500	32.900
	002417. Snack Rapat Persiapan ( 25 Org x 1 Hr x 2 Kl )	50	OK	19.200				960.000	0
	002418. Makan Rapat Persiapan ( 25 Org x 1 Hr x 2 Kl )	50	OK	38.400				1.920.000	0
	002419. Snack Penyusunan Laporan Akhir ( 35 Org x 1 Hr x 2 Kl )	70	OK	24.000		528.000		1.678.000	2.000
	002420. Makan Penyusunan Laporan Akhir ( 35 Org x 1 Hr x 2 Kl )	70	OK	51.300		1.144.000		3.585.500	5.500
	002421. Snack Rapat Koordinasi ( 20 Org x 1 Hr x 7 Kl )	140	OK	22.300				3.120.000	2.000
	002422. Makan Rapat Koordinasi ( 20 Org x 1 Hr x 7 Kl )	140	OK	49.300				6.890.000	12.000
	002423. Penggandaan Laporan Akhir	10	EKS	194.800		1.948.000		1.948.000	0
	002425. Foto Copy	2	PKT	1.045.200		586.500		2.079.000	11.400
522151	Belanja Jasa Profesi			2.000.000	-	-	-	2.000.000	0
	002427. Narasumber ( 1 Org x 2 Jam x 1 Kl )	2	OJ	1.000.000				2.000.000	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa > PETUGAS PUSAT			216.048.000	-	26.225.746	14.922.000	191.042.809	25.005.191
	002429. Tiket ( 3 Org x 9 1 x 2 Kl )	50	OT	1.344.520		19.030.254		67.226.000	0
	002430. Uang Harian ( 3 Org x 9 SKP/KPB x 5 Hr x 1 Kl )	135	OH	400.000		1.713.980	5.902.000	53.999.218	782
	002431. Uang Penginapan ( 3 Org x 9 SKP/KPB x 4 Hr x 1 Kl )	108	OH	496.500		1.785.864	8.315.000	53.621.383	617
	002432. Transport Lokal ( 3 Org x 9 SKP/KPB x 1 Kl )	27	OK	600.000		3.695.648	705.000	16.196.208	3.792
	Tiket	1	OT	25.000.000				-	25.000.000
B	Kajian Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Terhadap 152 Kawasan Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian			164.484.600	-	-	-	164.474.100	10.500
521211	Belanja Bahan			10.568.000	-	-	-	10.561.000	7.000
	004304. Foto Kopi	1	PKT	1.491.000				1.491.000	0
	004305. Konsumsi Rapat Persiapan ( 25 Org x 1 Kl )	25	OH	77.000				1.925.000	0
	004306. Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir ( 20 Org x 1 Hr x 4 Kl )	80	OK	76.900				6.145.000	7.000
	004307. Penggandaan Laporan Akhir	1	PKT	1.000.000				1.000.000	0
522131	Belanja Jasa Konsultan			59.640.000	-	-	-	59.640.000	0
	002436. Tenaga Ahli ( 2 Org x 3 BLN )	6	OB	9.940.000				59.640.000	0
522151	Belanja Jasa Profesi			10.000.000	-	-	-	10.000.000	0
	004439. Tenaga Ahli ( 1 Org x 2 Jam x 5 Kl )	10	OJ	1.000.000				10.000.000	0
524111	Belanja perjalanan biasa			34.452.000	-	-	-	34.451.000	1.000
	004308. Tiket ( 5 Org x 1 Kab x 1 Kl )	5	OT	2.321.600				11.607.585	415
	004309. Uang harian ( 5 Org x 1 Kab x 4 HR x 1 Kl )	20	OH	542.700				10.854.000	0
	004310. Uang Penginapan ( 5 Org x 1 Kab x 2 HR x 1 Kl )	15	OH	666.000				9.990.000	0
	004311. Transport ( 5 Org x 1 Kab x 1 Kl )	5	OK	400.000				1.999.415	585
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota > Biaya Paket Kegiatan Fullboard Meeting			49.824.600	-	-	-	49.822.100	2.500
	004313. Paket Fullboard Esellon III ke bawah ( 25 ORG x 1 Kl x 1 HR )	31	OH	1.177.500				36.500.000	2.500
	004314. Uang Harian ( 33 ORG x 1 Kl x 2 HR )	66	OK	180.000				11.880.000	0
	004315. Transport ( 10 ORG x 1 Kl x 1 HR )	11	OH	131.100				1.442.100	0
	000000. Paket Fullboard Eselon II ( 0 ORG x 1 Kl x 1 HR )	0	OH	650.000				-	0
C	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan			300.000.000	-	-	-	299.999.700	300
522131	Belanja Jasa Konsultan								
	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	1	PKT	300.000.000				299.999.700	300

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL		
(1)	(2)	(3)	(4)						
<b>D</b>	<b>Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang</b>							90,46%	9,54%
<b>522191</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>								
	Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang	1	PKT	199.986.000				199.985.500	500
<b>052</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan</b>								
<b>A</b>	<b>Monitoring dan Pendampingan RTSP- RT Pusat SKP</b>								
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>								
	002437. Penggandaan Laporan Akhir	10	EKS	381.100				3.810.000	1.000
	002438. Foto Copy	2	PKT	2.000.000				3.810.000	0
	002439. Snack rapat persiapan ( 25 Org x 1 KL )	25	OK	24.000		1.590.000		4.000.000	0
	002440. Makan rapat persiapan ( 25 Org x 1 KL )	25	OK	48.760				600.000	0
	002441. Snack rapat pembahasan ( 25 Org x 3 KL )	75	OK	24.000				1.175.000	44.000
	002442. Konsumsi rapat pembahasan ( 25 Org x 3 KL )	75	OK	50.880				1.770.000	30.000
						1.028.000		3.773.500	42.500
<b>524111</b>	<b>Belanja perjalanan biasa</b>								
	002443. Tiket ( 2 Org x 12 SP x 1 KL )	24	OT	4.416.542				208.232.000	1.759
	002444. Uang harian ( 2 Org x 12 SP x 5 HR x 1 KL )	120	OH	319.750				224.500	635
	002445. Uang Penginapan ( 2 Org x 12 SP x 4 HR x 1 KL )	96	OH	379.542		224.500		105.997.000	556
	002446. Transportasi ( 2 Org x 12 SP x 1 KL )	24	OK	1.142.875				38.370.000	456
								36.436.000	112
								27.429.000	
<b>B</b>	<b>Bimtek Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>								
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>								
	002438. Foto Copy	2	PKT	1.000.000				200.778.000	200.778.000
	002438. Seminar Kit	40	PKT	250.000				12.000.000	12.000.000
<b>524111</b>	<b>Belanja perjalanan biasa</b>								
	002443. Tiket ( 2 Org x 5 Prov x 1 KL )	10	OT	1.357.800				36.578.000	36.578.000
	002444. Uang harian ( 2 Org x 5 Prov x 2 HR x 1 KL )	20	OH	500.000				105.996.365	635
	002445. Uang Penginapan ( 2 Org x 5 Prov x 1 HR x 1 KL )	10	OH	800.000				38.369.444	556
	002446. Transportasi ( 2 Org x 5 Prov x 1 KL )	10	OK	500.000				36.435.544	456
								27.428.888	112
<b>524119</b>	<b>Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota</b>								
	> Biaya Paket Kegiatan Fullboard di Kendari								
	Pelaksanaan Kegiatan, Akomodasi, Konsumsi ( 40 Org x 1 Prov x 3 HR x 1 KL )	120	OK	1.095.000				200.778.000	200.778.000
	Uang Harian Fullboard ( 40 Org x 1 Prov x 4 HR x 1 KL )	160	OH	130.000				12.000.000	12.000.000
<b>054</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>								
<b>A</b>	<b>Klarifikasi Bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat</b>								
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>								
	(KPPN.182-Jakarta VII)								
	002456. Penggandaan Bahan Materi	54	PKT	Rp 25.000				91.581.000	25.002.955
	002457. Snack Rapat Persiapan ( 16 org x 1 hr x 1 kl )	16	OH	Rp 22.000				4.210.000	1.200
	002458. Makan Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	Rp 53.000				599.000	66.578.045
	002459. Snack Penyusunan Laporan Sementara ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	Rp 24.000				599.000	25.002.955
	002460. Makan Penyusunan Laporan Sementara ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	Rp 37.650				4.208.800	1.200
	002463. Penggandaan Laporan Akhir	2	PKT	Rp 300.000		599.000		1.349.800	200
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa</b>								
	(KPPN.182-Jakarta VII)								
	> Petugas Pusat								
	002465. Tiket ( 4 org x 2 sp x 1 kl )	8	OT	Rp 3.198.125				62.176.745	25.001.255
	002466. Uang Harian ( 4 org x 2 sp x 4 hr x 1 Kl )	32	OH	Rp 576.625				25.585.000	255
	002467. Uang Penginapan ( 4 org x 2 sp x 3 hr x 1 Kl )	22	OH	Rp 628.000				18.452.000	600
	002468. Transport Lokal ( 4 org x 2 sp x 1 kl )	8	OT	Rp 540.625				13.816.000	0
								4.324.600	400

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL		
(1)	(2)	(3)	(4)	-	-	-	-	90,46%	9,54%
	<b>Tiket</b>	<b>1</b>	<b>OT</b>	<b>25.000.000</b>				-	25.000.000
	>> Petugas Daerah			193.000	-	-	-	192.500	500
	002471. Transport ( 1 org x 2 sp x 1 hr )	2	OK	Rp 96.500				192.500	500
<b>B</b>	<b>Updating Data Sipukat</b>			<b>119.999.000</b>	-	<b>5.013.200</b>	-	<b>119.995.050</b>	<b>3.950</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>21.399.000</b>	-	<b>5.013.200</b>	-	<b>21.395.050</b>	<b>3.950</b>
	002472. Penggandaan Bahan Materi	60	PKT	25.000				1.499.600	400
	002473. Tumblr SIPUKAT	100	PKT	99.190				9.919.000	0
	002474. Snack Persiapan Kegiatan ( 16 org x 1 kl )	16	OK	22.000				352.000	0
	002475. Makan Persiapan Kegiatan ( 16 org x 1 kl )	16	OK	49.000				784.000	0
	002476. Snack Rapat Penyusunan Materi ( 25 org x 1 kl )	25	OK	24.000				600.000	0
	002477. Makan Rapat Penyusunan Materi ( 25 org x 1 kl )	25	OK	52.400				1.310.000	750
	002478. Snack Rapat Penyusunan Laporan akhir ( 25 org x 1 kl )	25	OK	23.920				598.000	0
	002479. Makan Rapat Penyusunan Laporan akhir ( 25 org x 1 kl )	25	OK	52.800				1.320.000	0
	002480. Penggandaan laporan akhir	2	PKT	349.000			698.000	698.000	0
	000000. Souvenir Sipukat	100	PKT	43.180			4.315.200	4.315.200	2.800
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan</b>			<b>87.800.000</b>	-	-	-	<b>87.800.000</b>	<b>0</b>
	(KPPN.182-Jakarta VII)								
	> Tenaga Ahli			87.800.000	-	-	-	87.800.000	-
	002481. Ahli GIS	8	OB	8.480.000				67.840.000	0
	002482. Ahli Sistem Informasi	4	OB	4.990.000				19.960.000	0
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>			<b>10.800.000</b>	-	-	-	<b>10.800.000</b>	<b>0</b>
	002483. Narasumber ( 2 org x 1 hr x 2 jam x 3 Kl)	12	OJ	900.000				10.800.000	0
<b>055</b>	<b>Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi</b>			<b>1.047.641.000</b>	<b>44.151.963</b>	<b>28.844.115</b>	<b>160.070.744</b>	<b>1.007.493.381</b>	<b>40.147.619</b>
<b>A</b>	<b>Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknik/Program</b>			<b>5.000.000</b>	-	-	-	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>5.000.000</b>	-	-	-	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>
	> PROGRAM KERJA DIREKTORAT			5.000.000	-	-	-	5.000.000	0
	002485. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan	10	EKS	250.000				2.500.000	0
	002486. Penggandaan dan Penjilidan Laporan	10	EKS	250.000				2.500.000	0
<b>B</b>	<b>Evaluasi / Laporan Kegiatan</b>			<b>11.992.000</b>	-	-	<b>5.992.000</b>	<b>11.992.000</b>	<b>0</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>								
	> LAPORAN BULANAN DIREKTORAT			7.000.000	-	-	1.000.000	7.000.000	0
	002491. Penggandaan Bahan Materi	10	EKS	200.000				1.000.000	0
	002492. Penggandaan dan Penjilidan [ 5 EKS x 10 BLN ]	12	EKS	500.000				1.000.000	0
	> LAPORAN KINERJA DIREKTORAT			4.992.000	-	-	4.992.000	4.992.000	0
	002496. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Triwulan	4	EKS	500.000				2.000.000	0
	002497. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Tahunan [ 5 EKS x 1 KL ]	10	EKS	299.200				2.992.000	0
<b>C</b>	<b>Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi</b>			<b>136.499.000</b>	-	<b>2.111.200</b>	-	<b>136.494.976</b>	<b>4.024</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>102.999.000</b>	-	<b>2.111.200</b>	-	<b>102.994.976</b>	<b>4.024</b>
	002498. Penggandaan Bahan Materi	10	EKS	100.000				1.000.000	0
	002499. Snack Rapat Kerja/Dinas Direktorat [ 25 ORG x 1 HR x 25 KL ]	1297	OK	20.000				25.936.496	3.504
	002500. Makan Rapat Kerja/Dinas Direktorat [ 25 ORG x 1 HR x 25 KL ]	1000	OK	37.059			2.111.200	37.058.480	520
	002501. Penggandaan Cetak Majalah Media Informasi Perencanaan Teknis ( 4 kl x 50 Eks )	156	EKS	250.000				39.000.000	0
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>			<b>33.500.000</b>	-	-	-	<b>33.500.000</b>	<b>0</b>
	002502. Narasumber (Pejabat Eselon II/Setara) ( 2 org x 1 kl x 2 jam )	4	OJ	1.000.000				4.000.000	0
	002503. Narasumber (Pejabat Eselon III/Setara) ( 1 org x 20 kl x 2 jam )	40	OJ	737.500				29.500.000	0
<b>D</b>	<b>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>			<b>260.383.000</b>	-	-	<b>32.422.000</b>	<b>260.290.115</b>	<b>92.885</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>32.883.000</b>	-	-	<b>5.000.000</b>	<b>32.864.315</b>	<b>18.685</b>
	002504. Penggandaan Bahan Materi dan Percetakan	2	BLN	1.000.000				2.000.000	0
	002505. Penggandaan dan Penjilidan Daftar Arsip Aktif Direktorat P2KT	2	PKT	1.000.000				2.000.000	0
	002506. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Pegawai ASN Non ASN ( 1 EKS x 12 BLN )	12	BLN	500.000				1.000.000	0
	002507. Penggandaan dan Penjilidan Laporan SKP Tahunan Pegawai Dit. P2KT	2	PKT	1.000.000				2.000.000	0

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL			
(1)	(2)	(3)	(4)	-	-	-	-	90,46%	9,54%	
	002508. Biaya Pengiriman Surat-Surat	10	BLN	64.200	642.000			642.000	0	
	004674. Penggandaan Bahan Materi dan Percetakan Kegiatan Zona Integritas	10	KL	24.100	241.000			240.315	685	
	000000. Perlengkapan 17 Agustus	1	PKT	20.000.000	20.000.000			19.982.000	18.000	
<b>521811</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</b>				<b>227.500.000</b>	-	-	<b>27.422.000</b>	<b>227.425.800</b>	<b>74.200</b>
	> Keperluan Kelompok Substansi									
	002509. ATK [ 4 KS x 1 PKT x 6 BLN ]	24	PKT	3.000.000	72.000.000			12.589.000	2.000	
	002510. Komputer Supplies [ 4 KS x 1 PKT x 6 BLN ]	24	PKT	3.500.000	84.000.000			14.423.000	0	
	004316. ATK (Tata Usaha Pengelola Keuangan)	3	PKT	3.000.000	9.000.000			410.000	700	
	004317. Komputer Supplies (Tata Usaha Pengelola Keuangan)	3	PKT	3.500.000	10.500.000			10.428.500	71.500	
	004441. ATK	4	PKT	3.000.000	12.000.000			12.000.000	0	
	004442. Komputer Supplies	4	PKT	3.500.000	14.000.000			14.000.000	0	
	004444. ATK	4	PKT	3.000.000	12.000.000			12.000.000	0	
	004445. Komputer Supplies	4	PKT	3.500.000	14.000.000			14.000.000	0	
<b>E</b>	<b>OPERASIONAL PIMPINAN</b>				<b>392.121.000</b>	<b>44.151.963</b>	<b>16.418.215</b>	<b>98.735.844</b>	<b>377.110.490</b>	<b>15.010.510</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>86.281.000</b>	-	<b>4.732.715</b>	<b>12.346.030</b>	<b>86.278.107</b>	<b>2.893</b>
	002511. Keperluan sehari-hari pimpinan	10	BLN	4.088.800	40.888.000		1.702.715	7.235.650	40.887.727	273
	002512. Penjilidan Laporan Kegiatan Pimpinan	10	EKS	303.200	3.032.000		730.000		3.030.000	2.000
	002513. Layanan Pimpinan	10	PKT	1.636.100	16.361.000		2.300.000	5.110.380	16.360.380	620
	004446. ATK	4	PKT	3.000.000	12.000.000				12.000.000	0
	004447. Komputer Supplies	4	PKT	3.500.000	14.000.000				14.000.000	0
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa</b>				<b>305.840.000</b>	<b>44.151.963</b>	<b>11.685.500</b>	<b>86.389.814</b>	<b>290.832.383</b>	<b>15.007.617</b>
	> Dalam Rangka Kegiatan Pimpinan									
	002514. Tiket ( 2 Org x 15 Prov x 1 Kl )	30	OT	4.763.000	142.890.000	21.471.950	6.470.000	39.223.790	142.889.165	835
	002515. Uang Harian ( 2 Org x 15 Prov x 3 Hr x 1 )	90	OH	500.000	45.000.000	6.360.000	540.000	11.320.000	45.000.000	0
	002516. Uang Penginapan ( 2 Org x 15 Prov x 2 Hr x 1 )	60	OH	1.000.000	60.000.000	8.275.000	2.800.000	26.419.000	59.999.500	500
	002517. Transport ( 2 Org x 15 Prov x 1 Kl )	30	OK	1.000.000	30.000.000	6.845.013	1.875.500	9.427.024	29.993.718	6.282
	002518. Biaya Representasi Pejabat Eselon II ( 1 Org x 15 Prov x 25 Kl )	100	OH	129.500	12.950.000	1.200.000			12.950.000	0
	00000. Tiket ( 2 Org x 15 Prov x 1 Kl )	1	OT	15.000.000	15.000.000				-	15.000.000
<b>F</b>	<b>Administrasi dan Kegiatan PPK Satker Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi</b>				<b>239.667.000</b>	-	<b>10.314.700</b>	<b>20.941.900</b>	<b>214.626.800</b>	<b>25.040.200</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>172.667.000</b>	-	<b>10.314.700</b>	<b>18.074.900</b>	<b>147.631.000</b>	<b>25.036.000</b>
	> PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL)				31.500.000	-	409.200	1.621.000	31.471.300	28.700
	002526. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan ( 5 EKS x 5 KS x 6 BLN )	150	EKS	150.000	22.500.000		409.200	1.621.000	22.499.600	400
	002527. Penggandaan dan Penjilidan (Draft dan Final) ( 5 EKS x 12 BLN )	60	EKS	150.000	9.000.000				8.971.700	28.300
	> PELAKSANAAN ANGGARAN				54.814.000	-	1.999.200	7.942.100	54.809.400	4.600
	002523. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan ( 5 EKS x 5 KS x 5 BLN )	150	EKS	150.000	22.500.000		1.999.200	962.100	22.499.600	400
	002530. Penggandaan Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Anggaran ( )	25	EKS	200.000	5.000.000				4.998.000	2.000
	002531. Penggandaan Laporan Tahunan Pelaksanaan Anggaran ( )	25	EKS	200.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	0
	002532. Pencetakan, Penggandaan Dokumen SPJ ( 5 EKS x 5 KS x 12 BLN )	400	EKS	55.785	22.314.000			1.980.000	22.311.800	2.200
	> SAK / SAI				31.500.000	-	1.998.000	5.148.800	31.498.100	1.900
	002520. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan ( 5 EKS x 5 KS x 6 BLN )	150	EKS	150.000	22.500.000		1.998.000	1.786.000	22.498.600	1.400
	002521. Penggandaan dan Penjilidan ( 5 EKS x 12 BLN )	60	EKS	150.000	9.000.000			3.362.800	8.999.500	500
	> Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) / E-MONEV BAPPENAS / SMART DJA				54.853.000	-	5.908.300	3.363.000	29.852.200	25.000.800
	002529. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan	122	EKS	150.000	18.300.000		1.910.400	1.700.000	18.299.500	500
	002524. Penggandaan dan Penjilidan Laporan ( 5 EKS x 10 BLN )	50	EKS	202.260	10.113.000		3.997.900	1.663.000	10.112.700	300
	002525. Materai ( 10 LBR x 12 BLN )	120	LBR	12.000	1.440.000				1.440.000	0
	Penggandaan	1	OT	25.000.000	25.000.000				-	25.000.000
<b>521811</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</b>				<b>65.000.000</b>	-	-	<b>2.867.000</b>	<b>64.995.800</b>	<b>4.200</b>
	004318. ATK	10	PKT	3.000.000	30.000.000			540.000	29.998.500	1.500
	004319. Komputer Supplies	10	PKT	3.500.000	35.000.000			2.327.000	34.997.300	2.700
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>				<b>2.000.000</b>	-	-	-	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
	002534. Narasumber	2	OJ	1.000.000	2.000.000				2.000.000	0
<b>G</b>	<b>Penyusunan Peta Resiko DIT P2KT</b>				<b>1.979.000</b>	-	-	<b>1.979.000</b>	<b>1.979.000</b>	<b>0</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>1.979.000</b>	-	-	<b>1.979.000</b>	<b>1.979.000</b>	<b>0</b>
	002537. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kegiatan	10	EKS	197.900	1.979.000			1.979.000	1.979.000	0

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL		
(1)	(2)	(3)	(4)	-	-	-	-	90,46%	9,54%
<b>056</b>	<b>Koordinasi Rencana Program/Kegiatan Lintas Sektor di Kawasan Transmigrasi</b>			<b>533.193.000</b>	-	<b>31.151.625</b>	<b>31.441.925</b>	<b>443.968.383</b>	<b>89.224.617</b>
<b>A</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Afirmasi Lintas Sektor di Kawasan Transmigrasi Prioritas</b>			<b>533.193.000</b>	-	<b>31.151.625</b>	<b>31.441.925</b>	<b>443.968.383</b>	<b>89.224.617</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>74.020.000</b>	-	<b>28.000.625</b>	<b>29.441.925</b>	<b>74.019.150</b>	<b>850</b>
	002538. Snack Rapat ( 20 Org x 6 Kl )	1276	OK	20.000		14.039.900	5.930.700	25.519.550	450
	002539. Makan Rapat ( 20 Org x 6 Kl )	770	OK	50.000		13.960.725	13.511.225	38.499.600	400
	Penggandaan Pencermatan 45 Prioritas Nasional dan 108 Prioritas Kementerian	100	Eks	100.000			10.000.000	10.000.000	0
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>			<b>9.700.000</b>	-	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>0</b>
	002541. Narasumber	20	OJ	485.000		1.900.000	2.000.000	9.700.000	0
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa</b>			<b>360.251.000</b>	-	<b>1.251.000</b>	-	<b>360.249.233</b>	<b>1.767</b>
	002542. Tiket [ 4 ORG x 10 PROV x 1 KL ]	40	OT	4.461.775		1.251.000		169.888.299	8.582.701
	002543. Uang Harian [ 4 ORG x 10 PROV x 3 HR x 1 KL ]	80	OH	623.975				55.650.000	-5.732.000
	002544. Uang Penginapan [ 4 ORG x 10 PROV x 2 HR x 1 KL ]	40	OH	1.997.025				83.710.824	-3.829.824
	002545. Transport [ 4 ORG x 10 PROV x 1 KL ]	40	OK	999.525				43.200.110	-3.219.110
	002546. Biaya Representasi Pejabat Eselon II [ 1 Org x 10 Prov x 8 Kl ]	80	OH	150.000				7.800.000	4.200.000
<b>524119</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>			<b>89.222.000</b>	-	-	-	-	<b>89.222.000</b>
	> Biaya Paket Kegiatan Fullboard Meeting di Yogyakarta								
	002548. Pelaksanaan Kegiatan. Akomodasi, Konsumsi ( 35 ORG x 1 KL x 3 HR )	105	OK	750.000					78.750.000
	002547. Uang Harian Fullboard ( 35 ORG x 1 KL x 4 HR )	140	OH	74.800					10.472.000
<b>6471.UBA.001</b>	<b>Fasilitas Pengurusan HPL Transmigrasi</b>			<b>850.000.000</b>	-	<b>647.000</b>	<b>253.879.400</b>	<b>824.944.534</b>	<b>25.055.466</b>
<b>051</b>	<b>Fasilitas Pelepasan Kawasan Hutan</b>			<b>756.819.000</b>	-	<b>647.000</b>	<b>250.606.400</b>	<b>731.765.301</b>	<b>25.053.699</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Untuk Lahan Usaha II Lokasi Batubi Sp.1., SP.2., dan SP.3 Kabupaten Natunan Provinsi Kepulauan Riau.</b>			<b>756.819.000</b>	-	<b>647.000</b>	<b>250.606.400</b>	<b>731.765.301</b>	<b>25.053.699</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>85.485.000</b>	-	-	-	<b>85.479.240</b>	<b>5.760</b>
	'(KPPN.182-JAKARTA VII)								
	Penyusunan Rencana kerja			2.960.000				2.960.000	-
	003325. Snack Persiapan Pembahasan Peta Rencana Kerja	20	OH	23.000				460.000	0
	003327. Pencetakan dan Penggandaan Laporan Buku Rencana Kerja	1	PKT	2.500.000				2.500.000	0
	Pelaksanaan Timber Cruising			82.525.000				82.519.240	5.760
	003314. Alat Tulis Lapangan ( 3 Un x 3 Pkt )	8	Pkt	299.750				2.398.000	0
	003315. Tally Seet ( 3 Un x 3 Pkt )	8	Pkt	248.250				1.986.000	0
	003317. Batre Alkalin untuk GPS dan Kamera	2	PKt	300.000				600.000	0
	003318. Logistik Buruh di Lapangan ( 32 Or x 18 Hr )	576	PKt	67.000				38.586.240	5.760
	003319. Perlengkapan lapangan	1	Pkt	15.678.000				15.678.000	0
	003319. Label Pohon	5	Pkt	997.000				4.985.000	0
	003320. Snack Pembahasan Hasil Pelaksanaan	20	OH	20.000				400.000	0
	003321. Makan Pembahasan Hasil Pelaksanaan	20	OH	46.000				920.000	0
	003328. Pencetakan dan Penggandaan Buku Laporan Hasil dan Peta Timber Cruising	17	PKT	998.000				16.966.000	0
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan</b>			<b>10.000.000</b>	-	-	-	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
	003333. Ahli Manajemen Hutan/Ganis Canhut [ 1 org x 1 Bln ]	1	OB	10.000.000				10.000.000	0
<b>522141</b>	<b>Belanja Sewa</b>			<b>36.764.000</b>	-	-	-	<b>36.763.200</b>	<b>800</b>
	003336. GPS (Timber Cruising) [ 8 Unit x 20 Hr ]	160	Unit	149.850				23.976.000	0
	003337. Kompas Shunto [ 8 Unit x 20 Hr ]	160	Unit	29.975				4.795.200	800
	003338. Phi Band [ 8 Unit x 20 Hr ]	160	Unit	49.950				7.992.000	0
<b>522191</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>			<b>396.154.000</b>	-	-	<b>249.993.900</b>	<b>396.153.900</b>	<b>100</b>
	003340. PSDH/DR (Potensi 25% dari luasan 1460 Ha) (AKUN421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan)	1	PKT	-				-	0
	<b>PSDH/DR (Potensi 25% dari luasan 1460 Ha)</b>								
	003341. Pengolah data hasil survey [ 1 org x 1 Bln x 4 Regu ]	4	OB	1.500.000				6.000.000	0

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL			
(1)	(2)	(3)	(4)	-	-	-	-	90,46%	9,54%	
	003332. Upah Buruh di Lapangan [ 33 Org x 17 Hr x 1 Regu ]	561	OH	150.000	84.150.000			84.150.000	0	
	003332. Upah Buruh di Lapangan (Tata Batas Blok Tebangan) [ 11 Org x 3 Hr x 1 Regu ]	33	OH	150.000	4.950.000			4.950.000	0	
	000000. Surveyor (Timber Cruising) [ 7 Org x 20 Hr x 1 Lok ]	160	PKT	319.125	51.060.000			51.060.000	0	
	Alih Media Dokumen Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	1	PKT	149.994.000	149.994.000		149.994.000	149.994.000	0	
	Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke 74	1	PKT	100.000.000	100.000.000		99.999.900	99.999.900	100	
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa '(KPPN.182-JAKARTA VII)</b>				<b>225.886.000</b>	-	-	<b>200.869.461</b>	<b>25.016.539</b>	
	> Dalam Rangka Timber Cruising				88.786.000	-	-	63.786.000	25.000.000	
	003353. Tiket ( 3 Org x 1 Prov/Kab x 2 Kl )	6	OT	5.000.000	30.000.000			30.000.000	0	
	003354. Transport Lokal Bandara (Jakarta) ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 Kl x 3 Kl )	6	OK	256.000	1.230.000			1.230.000	0	
	003357. Uang Harian ( 3 Org x 1 Prov/Kab x 20 Hr x 2 Kl )	61	OH	370.000	22.570.000			22.570.000	0	
	003358. Biaya Penginapan ( 3 Org x 1 Prov/Kab/Lo x 19 Hr x 2 Kl )	20	OH	499.300	9.986.000			9.986.000	0	
	<b>Tiket</b>	<b>1</b>	<b>OT</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>			<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	
	> Dalam Rangka Tata Batas Blok Tebangan				137.100.000	-	-	137.083.461	16.539	
	003360. Tiket ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 1 Kl )	5	OT	4.876.800	24.384.000			24.383.800	200	
	003344. Transport Lokal Bandara (Jakarta) ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 PP x 3 kl )	23	OK	256.000	5.888.000			5.888.000	0	
	003345. Transport Lokal Bandara (Daerah) ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 PP x 3 kl )	30	OK	250.000	7.500.000			7.500.000	0	
	003346. Transport Provinsi-Kabupaten PP ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 PP x 3 kl )	30	OK	452.000	13.540.000			13.534.972	5.028	
	003347. Biaya Penginapan ( 5 Org x 1 Prov/Kab/Lo x 19 Hr x 2 kl )	180	OH	476.600	85.788.000			85.776.689	11.311	
<b>524113</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>				<b>2.530.000</b>	-	<b>647.000</b>	<b>612.500</b>	<b>2.499.500</b>	<b>30.500</b>
	003340. Transport Dalam Kota	11	OT	230.000	2.530.000		647.000	612.500	2.499.500	30.500
<b>053</b>	<b>Fasilitasi Pengurusan HPL Transmigrasi</b>	<b>2</b>	<b>Daerah</b>		<b>93.181.000</b>	-	-	<b>3.273.000</b>	<b>93.179.233</b>	<b>1.767</b>
<b>A</b>	<b>Klarifikasi Pengurusan HPL Transmigrasi</b>				<b>93.181.000</b>	-	-	<b>3.273.000</b>	<b>93.179.233</b>	<b>1.767</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan '(KPPN.182-JAKARTA VII)</b>				<b>3.274.000</b>	-	-	<b>3.273.000</b>	<b>3.273.000</b>	<b>1.000</b>
	003363. Konsumsi Rapat Klarifikasi Pengurusan HPL Transmigrasi (Snack) ( 20 Org x 2 Kl )	0	OK	-	-			-	0	
	003365. Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2	PKT	1.637.000	3.274.000		3.273.000	3.273.000	1.000	
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa '(KPPN.182-JAKARTA VII)</b>				<b>89.907.000</b>	-	-	<b>89.906.233</b>	<b>767</b>	
	003366. Tiket ( 4 Org x 2 Prov x 1 Kl )	8	OT	5.000.000	40.000.000			39.999.880	120	
	003367. Transport ( 4 Org x 2 KAB x 1 Kl )	8	OK	1.488.375	11.907.000			11.906.853	147	
	003368. Uang Harian ( 4 Org x 2 Prov x 5 Hr x 1 Kl )	40	OH	400.000	16.000.000			15.999.500	500	
	003369. Biaya Penginapan ( 4 Org x 2 Prov/Kab/Lo x 4 Hr x 1 Kl )	32	OH	687.500	22.000.000			22.000.000	0	
<b>6471.AFA</b>	<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria [Base Line]</b>	<b>2</b>	<b>NSPK</b>		<b>288.420.000</b>	-	-	<b>287.606.797</b>	<b>813.203</b>	
<b>6471.AFA.006</b>	<b>NSPK Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>2</b>	<b>NSPK</b>		<b>288.420.000</b>	-	-	<b>287.606.797</b>	<b>813.203</b>	
<b>054</b>	<b>Penyusunan NSPK Rencana Pengembangan Masyarakat</b>	<b>2</b>	<b>NSPK</b>		<b>288.420.000</b>	-	-	<b>287.606.797</b>	<b>813.203</b>	
<b>A</b>	<b>Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat KPB</b>				<b>136.365.000</b>	-	-	<b>136.339.025</b>	<b>25.975</b>	
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan '(KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>16.116.000</b>	-	-	<b>16.092.000</b>	<b>24.000</b>	
	001297. Penggandaan Bahan materi	80	EKS	25.000	2.000.000			1.997.500	2.500	
	001304. Snack Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	24.000	360.000			352.000	8.000	
	001305. Makan Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	52.800	792.000			792.000	0	
	001306. Snack Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	24.000	480.000			480.000	0	
	001307. Makan Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	52.500	1.050.000			1.049.500	500	
	001308. Penggandaan Laporan Pendahuluan	4	EKS	225.000	900.000			900.000	0	
	001309. Snack Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	24.000	600.000			598.000	2.000	
	001310. Makan Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	53.000	1.325.000			1.320.000	5.000	

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL		
(1)	(2)	(3)	(4)	-	-	-	-	90,46%	9,54%
	001311. Penggandaan Laporan Antara	4	EKS	247.500				990.000	0
	001298. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	24.000				357.000	3.000
	001299. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	51.000				765.000	0
	001300. Penggandaan Draft Laporan Akhir	4	PKT	297.500				1.190.000	0
	001301. Snack Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	24.000				720.000	0
	001302. Makan Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	52.800				1.584.000	0
	001303. Penggandaan Laporan Akhir	5	EKS	600.000				2.997.000	3.000
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan (KPPN.182-Jakarta VII)</b>			<b>80.370.000</b>	-	-	-	<b>80.370.000</b>	<b>0</b>
	> Tenaga Ahli			80.370.000	-	-	-	80.370.000	0
	001312. Ahli Planologi	3	OB	7.350.000				22.050.000	0
	001313. Ahli Sosiologi/Pengembangan Masyarakat	3	OB	6.480.000				19.440.000	0
	001314. Ahli Sosial Ekonomi Pertanian	3	OB	6.480.000				19.440.000	0
	001315. Ahli Teknik Sipil	3	OB	6.480.000				19.440.000	0
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi (KPPN.182-Jakarta VII)</b>			<b>5.400.000</b>	-	-	-	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>
	001316. Narasumber ( 1 org x 3 kl x 2 jam )	6	OJ	900.000				5.400.000	0
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.182-Jakarta VII)</b>			<b>34.479.000</b>	-	-	-	<b>34.477.025</b>	<b>1.975</b>
	> Petugas Pusat / Tenaga Ahli			33.054.000	-	-	-	33.052.025	1.975
	001320. Tiket ( 4 org x 1 kpb x 1 kl )	4	OT	Rp 3.395.250				13.581.000	775
	001321. Uang Harian ( 4 org x 1 kpb x 4 hr )	16	OH	Rp 593.750				9.500.000	0
	001322. Uang Penginapan ( 4 org x 1 kpb x 3 hr )	12	OH	Rp 571.750				6.861.000	1.000
	001323. Transport Lokal ( 4 org x 1 kpb x 1 kl )	4	OT	Rp 778.000				3.112.000	200
	>>> Transport Daerah			1.425.000	-	-	-	1.425.000	0
	001319. Peserta Daerah ( 15 org x 1 kl )	15	OH	Rp 95.000				1.425.000	0
<b>B</b>	<b>Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan</b>			<b>152.055.000</b>	-	-	-	<b>151.267.772</b>	<b>787.228</b>
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan (KPPN.182-Jakarta VII)</b>			<b>25.205.000</b>	-	-	-	<b>25.110.800</b>	<b>94.200</b>
	001328. Penggandaan Bahan Materi	80	EKS	25.000				1.993.800	6.200
	001335. Snack Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	24.000				352.000	8.000
	001336. Makan Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	53.000				770.000	25.000
	001337. Snack Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	24.000				480.000	0
	001338. Makan Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	53.000				1.060.000	0
	001339. Penggandaan Laporan Pendahuluan	4	EKS	225.000				894.000	6.000
	001340. Snack Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	24.000				598.000	2.000
	001341. Makan Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	53.000				1.299.000	26.000
	001342. Penggandaan Laporan Antara	4	EKS	250.000				1.000.000	0
	001329. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	24.000				352.000	8.000
	001330. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	53.000				792.000	3.000
	001331. Penggandaan Draft Laporan Akhir	4	PKT	300.000				1.192.000	8.000
	001332. Snack Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	24.000				720.000	0
	001333. Makan Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	53.000				1.590.000	0
	001334. Penggandaan Laporan Akhir Penyusunan Renbangmas	200	EKS	20.100				4.020.000	0
	Penggandaan Laporan Akhir Sarana dan Prasarana Penyusunan Renbangmas	500	EKS	16.000				7.998.000	2.000
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan (KPPN.182-Jakarta VII)</b>			<b>81.000.000</b>	-	-	-	<b>80.310.000</b>	<b>690.000</b>
	> Tenaga Ahli			81.000.000	-	-	-	80.310.000	690.000
	001343. Ahli Planologi	3	OB	7.500.000				22.035.000	465.000
	001344. Ahli Sosiologi/Pengembangan Masyarakat	3	OB	6.500.000				19.425.000	75.000
	001345. Ahli Sosial Ekonomi Pertanian	3	OB	6.500.000				19.425.000	75.000
	001346. Ahli Teknik Sipil	3	OB	6.500.000				19.425.000	75.000
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi (KPPN.182-Jakarta VII)</b>			<b>7.200.000</b>	-	-	-	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>
	001347. Narasumber Perencanaan dan Pengembangan Wilayah ( 1 org x 3 kl x 2 jam )	6	OJ	900.000				5.400.000	0
	004675. Narasumber Perencanaan Pembangunan Wilayah, ( 1 org x 1 kl x 2 jam )	2	OJ	900.000				1.800.000	0

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			Februari	Desember		REALISASI	SISA PAGU
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	UP_1	UP_14_NIHIL	TUP_9_NIHIL		
(1)	(2)	(3)	(4)						
	Perdesaan, dan Pengembangan Ekonomi Lokal			-	-	-	-	90,46%	9,54%
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.182-Jakarta VII)</b>			<b>38.650.000</b>	-	-	-	<b>38.646.972</b>	<b>3.028</b>
	> Petugas Pusat / Tenaga Ahli			37.225.000	-	-	-	37.221.972	3.028
	001351. Tiket ( 4 org x 1 kws x 1 kl )	4	OT Rp 3.682.250	14.729.000				14.727.372	1.628
	001352. Uang Harian ( 4 org x 1 kws x 6 hr )	24	OH Rp 475.000	11.400.000				11.400.000	0
	001353. Uang Penginapan ( 4 org x 1 kws x 5 hr )	20	OH Rp 461.500	9.230.000				9.229.600	400
	001354. Transport Lokal ( 4 org x 1 kws x 1 kl )	4	OT Rp 466.500	1.866.000				1.865.000	1.000
	> Petugas Daerah			-	-	-	-	-	-
	Uang Harian ( 1 org x 1 kws x 3 kl )	0	OT Rp 300.000	-				-	0
	Uang Penginapan ( 1 org x 1 kws x 2 hr )	0	OH Rp 300.000	-				-	0
	Transport ( 1 org x 1 kws x 1 hr )	0	OH Rp 300.000	-				-	0
	>> Petugas Daerah			1.425.000	-	-	-	1.425.000	0
	001356. Uang Harian ( 15 org x 1 kl )	15	OH Rp 95.000	1.425.000				1.425.000	0

**MATRIKS RENCANA RINCIAN KERTAS KERJA SATKER DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SISA PAGU	KEUANGAN	FISIK	BULAN NOVEMBER 2024		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				BULAN LALU	BULAN INI	S/D SAAT INI
(1)	(2)	(3)	Blokir	405.000.000	0,03%					99,97%
6471	DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI			3.854.822.000	1.194.460	99,97%	102,72%	3.289.503.785	564.123.755	3.853.627.540
6471.PBP.001	Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi			Rekomendasi Kebijakan 2.741.402.000	325.791	99,99%	102,74%	2.431.478.854	309.597.355	2.741.076.209
051	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB			879.732.000	28.134.447	96,80%	99,55%	806.243.307	45.354.246	851.597.553
A	Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB			215.261.400	38.091	99,98%	100,00%	169.869.063	45.354.246	215.223.309
521211	Belanja Bahan			22.213.400	32.900	99,85%	100,00%	17.974.000	4.206.500	22.180.500
	002417. Snack Rapat Persiapan ( 25 Org x 1 Hr x 2 Kl )	50	OK	19.200	960.000	0	100,00%	960.000	0	960.000
	002418. Makan Rapat Persiapan ( 25 Org x 1 Hr x 2 Kl )	50	OK	38.400	1.920.000	0	100,00%	1.920.000	0	1.920.000
	002419. Snack Penyusunan Laporan Akhir ( 35 Org x 1 Hr x 2 Kl )	70	OK	24.000	1.680.000	2.000	99,88%	1.150.000	528.000	1.678.000
	002420. Makan Penyusunan Laporan Akhir ( 35 Org x 1 Hr x 2 Kl )	70	OK	51.300	3.591.000	5.500	99,85%	2.441.500	1.144.000	3.585.500
	002421. Snack Rapat Koordinasi ( 20 Org x 1 Hr x 7 Kl )	140	OK	22.300	3.122.000	2.000	99,94%	3.120.000	0	3.120.000
	002422. Makan Rapat Koordinasi ( 20 Org x 1 Hr x 7 Kl )	140	OK	49.300	6.902.000	12.000	99,83%	6.890.000	0	6.890.000
	002423. Pengandaan Laporan Akhir	10	EKS	194.800	1.948.000	0	100,00%	0	1.948.000	1.948.000
	002425. Foto Copy	2	PKT	1.045.200	2.090.400	11.400	99,45%	1.492.500	586.500	2.079.000
522151	Belanja Jasa Profesi			2.000.000	0	100,00%	100,00%	2.000.000	0	2.000.000
	002427. Narasumber ( 1 Org x 2 Jam x 1 Kl )	2	OJ	1.000.000	2.000.000	0	100,00%	2.000.000	0	2.000.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa > PETUGAS PUSAT			191.048.000	5.191	100,00%	100,00%	149.895.063	41.147.746	191.042.809
	002429. Tiket ( 3 Org x 9 1 x 2 Kl )	50	OT	1.344.520	67.226.000	0	100,00%	48.195.746	19.030.254	67.226.000
	002430. Uang Harian ( 3 Org x 9 SKP/KPB x 5 Hr x 1 Kl )	135	OH	400.000	54.000.000	782	100,00%	46.383.238	7.615.980	53.999.218
	002431. Uang Penginapan ( 3 Org x 9 SKP/KPB x 4 Hr x 1 Kl )	108	OH	496.500	53.622.000	617	100,00%	43.520.519	10.100.864	53.621.383
	002432. Transport Lokal ( 3 Org x 9 SKP/KPB x 1 Kl )	27	OK	600.000	16.200.000	3.792	99,98%	11.795.560	4.400.648	16.196.208
B	Kajian Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Terhadap 152 Kawasan Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian			164.484.600	10.500	99,99%	100,00%	164.474.100	0	164.474.100
521211	Belanja Bahan			10.568.000	7.000	99,93%	100,00%	10.561.000	0	10.561.000
	004304. Foto Kopi	1	PKT	1.491.000	1.491.000	0	100,00%	1.491.000	0	1.491.000
	004305. Konsumsi Rapat Persiapan ( 25 Org x 1 Kl )	25	OH	77.000	1.925.000	0	100,00%	1.925.000	0	1.925.000
	004306. Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir ( 20 Org x 1 Hr x 4 Kl )	80	OK	76.900	6.152.000	7.000	99,89%	6.145.000	0	6.145.000
	004307. Pengandaan Laporan Akhir	1	PKT	1.000.000	1.000.000	0	100,00%	1.000.000	0	1.000.000
522131	Belanja Jasa Konsultan			59.640.000	0	100,00%	100,00%	59.640.000	0	59.640.000
	002436. Tenaga Ahli ( 2 Org x 3 BLN )	6	OB	9.940.000	59.640.000	0	100,00%	59.640.000	0	59.640.000
522151	Belanja Jasa Profesi			10.000.000	0	100,00%	100,00%	10.000.000	0	10.000.000
	004439. Tenaga Ahli ( 1 Org x 2 Jam x 5 Kl )	10	OJ	1.000.000	10.000.000	0	100,00%	10.000.000	0	10.000.000
524111	Belanja perjalanan biasa			34.452.000	1.000	100,00%	100,00%	34.451.000	0	34.451.000
	004308. Tiket ( 5 Org x 1 Kab x 1 Kl )	5	OT	2.321.600	11.608.000	415	100,00%	11.607.585	0	11.607.585
	004309. Uang harian ( 5 Org x 1 Kab x 4 HR x 1 Kl )	20	OH	542.700	10.854.000	0	100,00%	10.854.000	0	10.854.000
	004310. Uang Penginapan ( 5 Org x 1 Kab x 2 HR x 1 Kl )	15	OH	666.000	9.990.000	0	100,00%	9.990.000	0	9.990.000
	004311. Transport ( 5 Org x 1 Kab x 1 Kl )	5	OK	400.000	2.000.000	585	99,97%	1.999.415	0	1.999.415
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			49.824.600	2.500	99,99%	100,00%	49.822.100	0	49.822.100
	> Biaya Paket Kegiatan Fullboard Meeting									
	004313. Paket Fullboard Eselon III ke bawah ( 25 ORG x 1 KL x 1 HR )	31	OH	1.177.500	36.502.500	2.500	99,99%	36.500.000	0	36.500.000
	004314. Uang Harian ( 33 ORG x 1 KL x 2 HR )	66	OK	180.000	11.880.000	0	100,00%	11.880.000	0	11.880.000
	004315. Transport ( 10 ORG x 1 KL x 1 HR )	11	OH	131.100	1.442.100	0	100,00%	1.442.100	0	1.442.100
	000000. Paket Fullboard Eselon II ( 0 ORG x 1 KL x 1 HR )	0	OH	650.000	-					
C	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan			300.000.000	300	100,00%	100,00%	299.999.700	0	299.999.700
522131	Belanja Jasa Konsultan									
	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	1	PKT	300.000.000	300.000.000	300	100,00%	299.999.700	0	299.999.700

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SISA PAGU	KEUANGAN	FISIK	BULAN NOVEMBER 2024			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				BULAN LALU	BULAN INI	S/D SAAT INI	
(1)	(2)	(3)	Blokir	405.000.000	0,03%					99,97%	
<b>D</b>	<b>Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang</b>			<b>199.986.000</b>	500	100,00%	100,00%	199.985.500	0	199.985.500	
<b>522191</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>										
	Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang	1	PKT	199.986.000	199.986.000	500	100,00%	100,00%	199.985.500	0	199.985.500
<b>052</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan</b>			<b>223.478.000</b>	119.259	99,95%	100,00%	216.236.241	7.122.500	223.358.741	
<b>A</b>	<b>Monitoring dan Pendampingan RTSP- RT Pusat SKP</b>			<b>223.478.000</b>	119.259	99,95%	100,00%	216.236.241	7.122.500	223.358.741	
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>15.246.000</b>	117.500	99,23%	100,00%	8.230.500	6.898.000	15.128.500	
	002437. Pengandaan Laporan Akhir	10	EKS	381.100	3.811.000	1.000	99,97%	100,00%	0	3.810.000	3.810.000
	002438. Foto Copy	2	PKT	2.000.000	4.000.000	0	100,00%	100,00%	2.410.000	1.590.000	4.000.000
	002439. Snack rapat persiapan ( 25 Org x 1 KL )	25	OK	24.000	600.000	0	100,00%	100,00%	600.000	0	600.000
	002440. Makan rapat persiapan ( 25 Org x 1 KL )	25	OK	48.760	1.219.000	44.000	96,39%	100,00%	1.175.000	0	1.175.000
	002441. Snack rapat pembahasan ( 25 Org x 3 KL )	75	OK	24.000	1.800.000	30.000	98,33%	100,00%	1.300.000	470.000	1.770.000
	002442. Konsumsi rapat pembahasan ( 25 Org x 3 KL )	75	OK	50.880	3.816.000	42.500	98,89%	100,00%	2.745.500	1.028.000	3.773.500
<b>524111</b>	<b>Belanja perjalanan biasa</b>			<b>208.232.000</b>	1.759	100,00%	100,00%	208.005.741	224.500	208.230.241	
	002443. Tiket ( 2 Org x 12 SP x 1 KL )	24	OT	4.416.542	105.997.000	635	100,00%	100,00%	105.996.365	0	105.996.365
	002444. Uang harian ( 2 Org x 12 SP x 5 HR x 1 KL )	120	OH	319.750	38.370.000	556	100,00%	100,00%	38.369.444	0	38.369.444
	002445. Uang Penginapan ( 2 Org x 12 SP x 4 HR x 1 KL )	96	OH	379.542	36.436.000	456	100,00%	100,00%	36.211.044	224.500	36.435.544
	002446. Transportasi ( 2 Org x 12 SP x 1 KL )	24	OK	1.142.875	27.429.000	112	100,00%	100,00%	27.428.888	0	27.428.888
<b>054</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</b>			<b>186.580.000</b>	6.905	100,00%	100,00%	180.960.895	5.612.200	186.573.095	
<b>A</b>	<b>Klarifikasi Bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat</b>			<b>66.581.000</b>	2.955	100,00%	100,00%	65.979.045	599.000	66.578.045	
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>4.210.000</b>	1.200	99,97%	100,00%	3.609.800	599.000	4.208.800	
	(KPPN.182-Jakarta VII)										
	002456. Pengandaan Bahan Materi	54	PKT	Rp 25.000	1.350.000	200	99,99%	100,00%	1.349.800	0	1.349.800
	002457. Snack Rapat Persiapan ( 16 org x 1 hr x 1 kl )	16	OH	Rp 22.000	352.000	0	100,00%	100,00%	352.000	0	352.000
	002458. Makan Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	Rp 53.000	795.000	0	100,00%	100,00%	795.000	0	795.000
	002459. Snack Penyusunan Laporan Sementara ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	Rp 24.000	360.000	0	100,00%	100,00%	360.000	0	360.000
	002460. Makan Penyusunan Laporan Sementara ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	Rp 37.650	753.000	0	100,00%	100,00%	753.000	0	753.000
	002463. Pengandaan Laporan Akhir	2	PKT	Rp 300.000	600.000	1.000	99,83%	100,00%	0	599.000	599.000
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa</b>			<b>62.371.000</b>	1.755	100,00%	100,00%	62.369.245	0	62.369.245	
	(KPPN.182-Jakarta VII)										
	> Petugas Pusat			62.178.000	1.255	100,00%	100,00%	62.176.745	0	62.176.745	
	002465. Tiket ( 4 org x 2 sp x 1 kl )	8	OT	Rp 3.198.125	25.585.000	255	100,00%	100,00%	25.584.745	0	25.584.745
	002466. Uang Harian ( 4 org x 2 sp x 4 hr x 1 Kl )	32	OH	Rp 576.625	18.452.000	600	100,00%	100,00%	18.451.400	0	18.451.400
	002467. Uang Penginapan ( 4 org x 2 sp x 3 hr x 1 Kl )	22	OH	Rp 628.000	13.816.000	0	100,00%	100,00%	13.816.000	0	13.816.000
	002468. Transport Lokal ( 4 org x 2 sp x 1 kl )	8	OT	Rp 540.625	4.325.000	400	99,99%	100,00%	4.324.600	0	4.324.600
	>> Petugas Daerah			193.000	500	99,74%	100,00%	192.500	0	192.500	
	002471. Transport ( 1 org x 2 sp x 1 hr )	2	OK	Rp 96.500	193.000	500	99,74%	100,00%	192.500	0	192.500
<b>B</b>	<b>Updating Data Sipukat</b>			<b>119.999.000</b>	3.950	100,00%	100,00%	114.981.850	5.013.200	119.995.050	
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>21.399.000</b>	3.950	99,98%	100,00%	16.381.850	5.013.200	21.395.050	
	002472. Pengandaan Bahan Materi	60	PKT	25.000	1.500.000	400	99,97%	100,00%	1.499.600	0	1.499.600
	002473. Tumblir SIPUKAT	100	PKT	99.190	9.919.000	0	100,00%	100,00%	9.919.000	0	9.919.000
	002474. Snack Persiapan Kegiatan ( 16 org x 1 kl )	16	OK	22.000	352.000	0	100,00%	100,00%	352.000	0	352.000
	002475. Makan Persiapan Kegiatan ( 16 org x 1 kl )	16	OK	49.000	784.000	0	100,00%	100,00%	784.000	0	784.000
	002476. Snack Rapat Penyusunan Materi ( 25 org x 1 kl )	25	OK	24.000	600.000	0	100,00%	100,00%	600.000	0	600.000
	002477. Makan Rapat Penyusunan Materi ( 25 org x 1 kl )	25	OK	52.400	1.310.000	750	99,94%	100,00%	1.309.250	0	1.309.250
	002478. Snack Rapat Penyusunan Laporan akhir ( 25 org x 1 kl )	25	OK	23.920	598.000	0	100,00%	100,00%	598.000	0	598.000
	002479. Makan Rapat Penyusunan Laporan akhir ( 25 org x 1 kl )	25	OK	52.800	1.320.000	0	100,00%	100,00%	1.320.000	0	1.320.000
	002480. Pengandaan laporan akhir	2	PKT	349.000	698.000	0	100,00%	100,00%	0	698.000	698.000
	000000. Souvenir Sipukat	100	PKT	43.180	4.318.000	2.800	99,94%	100,00%	0	4.315.200	4.315.200
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan</b>			<b>87.800.000</b>	0	100,00%	100,00%	87.800.000	0	87.800.000	

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SISA PAGU	KEUANGAN	FISIK	BULAN NOVEMBER 2024		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				BULAN LALU	BULAN INI	S/D SAAT INI
(1)	(2)	(3)	Blokir	405.000.000	0,03%					99,97%
	<b>(KPPN.182-Jakarta VII)</b>									
	> <i>Tenaga Ahli</i>			87.800.000	0	100,00%	100,00%	87.800.000	0	87.800.000
	002481. Ahli GIS	8	OB	8.480.000	0	100,00%	100,00%	67.840.000	0	67.840.000
	002482. Ahli Sistem Informasi	4	OB	4.990.000	0	100,00%	100,00%	19.960.000	0	19.960.000
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>			<b>10.800.000</b>	0	100,00%	100,00%	10.800.000	0	10.800.000
	002483. Narasumber ( 2 org x 1 hr x 2 jam x 3 Kl)	12	OJ	900.000	0	100,00%	100,00%	10.800.000	0	10.800.000
<b>055</b>	<b>Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi</b>			<b>1.007.641.000</b>	147.619	99,99%	100,00%	818.578.522	188.914.859	1.007.493.381
<b>A</b>	<b>Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknik/Program</b>			<b>5.000.000</b>	0	100,00%	100,00%	5.000.000	0	5.000.000
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>5.000.000</b>	0	100,00%	100,00%	5.000.000	0	5.000.000
	> PROGRAM KERJA DIREKTORAT			5.000.000	0	100,00%	100,00%	5.000.000	0	5.000.000
	002485. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan	10	EKS	250.000	0	100,00%	100,00%	2.500.000	0	2.500.000
	002486. Penggandaan dan Penjilidan Laporan	10	EKS	250.000	0	100,00%	100,00%	2.500.000	0	2.500.000
<b>B</b>	<b>Evaluasi / Laporan Kegiatan</b>			<b>11.992.000</b>	0	100,00%	100,00%	6.000.000	5.992.000	11.992.000
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>									
	> LAPORAN BULANAN DIREKTORAT			7.000.000	0	100,00%	100,00%	6.000.000	1.000.000	7.000.000
	002491. Penggandaan Bahan Materi	10	EKS	200.000	0	100,00%	100,00%	1.000.000	0	1.000.000
	002492. Penggandaan dan Penjilidan [ 5 EKS x 10 BLN ]	12	EKS	500.000	0	100,00%	100,00%	5.000.000	1.000.000	6.000.000
	> LAPORAN KINERJA DIREKTORAT			4.992.000	0	100,00%	100,00%	0	4.992.000	4.992.000
	002496. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Triwulan	4	EKS	500.000	0	100,00%	100,00%	0	2.000.000	2.000.000
	002497. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Tahunan [ 5 EKS x 1 KL ]	10	EKS	299.200	0	100,00%	100,00%	0	2.992.000	2.992.000
<b>C</b>	<b>Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi</b>			<b>136.499.000</b>	4.024	100,00%	100,00%	134.383.776	2.111.200	136.494.976
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>102.999.000</b>	4.024	100,00%	100,00%	100.883.776	2.111.200	102.994.976
	002498. Penggandaan Bahan Materi	10	EKS	100.000	0	100,00%	100,00%	1.000.000	0	1.000.000
	002499. Snack Rapat Kerja/Dinas Direktorat [ 25 ORG x 1 HR x 25 KL ]	1297	OK	20.000	3.504	99,99%	100,00%	25.936.496	0	25.936.496
	002500. Makan Rapat Kerja/Dinas Direktorat [ 25 ORG x 1 HR x 25 KL ]	1000	OK	37.059	520	100,00%	100,00%	34.947.280	2.111.200	37.058.480
	002501. Penggandaan Cetak Majalah Media Informasi Perencanaan Teknis ( 4 kl x 50 Eks )	156	EKS	250.000	0	100,00%	100,00%	39.000.000	0	39.000.000
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>			<b>33.500.000</b>	0	100,00%	100,00%	33.500.000	0	33.500.000
	002502. Narasumber (Pejabat Eselon II/Setara) ( 2 org x 1 kl x 2 jam )	4	OJ	1.000.000	0	100,00%	100,00%	4.000.000	0	4.000.000
	002503. Narasumber (Pejabat Eselon III/Setara) ( 1 org x 20 kl x 2 jam )	40	OJ	737.500	0	100,00%	100,00%	29.500.000	0	29.500.000
<b>D</b>	<b>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>			<b>260.383.000</b>	92.885	99,96%	100,00%	227.868.115	32.422.000	260.290.115
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>32.883.000</b>	18.685	99,94%	100,00%	27.864.315	5.000.000	32.864.315
	002504. Penggandaan Bahan Materi dan Percetakan	2	BLN	1.000.000	0	100,00%	100,00%	2.000.000	0	2.000.000
	002505. Penggandaan dan Penjilidan Daftar Arsip Aktif Direktorat P2KT	2	PKT	1.000.000	0	100,00%	100,00%	0	2.000.000	2.000.000
	002506. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Pegawai ASN Non ASN ( 1 EKS x 12 BLN )	12	BLN	500.000	0	100,00%	100,00%	5.000.000	1.000.000	6.000.000
	002507. Penggandaan dan Penjilidan Laporan SKP Tahunan Pegawai Dit. P2KT	2	PKT	1.000.000	0	100,00%	100,00%	0	2.000.000	2.000.000
	002508. Biaya Pengiriman Surat-Surat	10	BLN	64.200	0	100,00%	100,00%	642.000	0	642.000
	004674. Penggandaan Bahan Materi dan Percetakan Kegiatan Zona Integritas	10	KL	24.100	685	99,72%	100,00%	240.315	0	240.315
	000000. Perlengkapan 17 Agustus	1	PKT	20.000.000	18.000	99,91%	100,00%	19.982.000	0	19.982.000
<b>521811</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</b>			<b>227.500.000</b>	74.200	99,97%	100,00%	200.003.800	27.422.000	227.425.800
	> <i>Keperluan Kelompok Substansi</i>									
	002509. ATK [ 4 KS x 1 PKT x 6 BLN ]	24	PKT	3.000.000	2.000	100,00%	100,00%	59.409.000	12.589.000	71.998.000
	002510. Komputer Supplies [ 4 KS x 1 PKT x 6 BLN ]	24	PKT	3.500.000	0	100,00%	100,00%	69.577.000	14.423.000	84.000.000
	004316. ATK (Tata Usaha Pengelola Keuangan)	3	PKT	3.000.000	700	99,99%	100,00%	8.589.300	410.000	8.999.300
	004317. Komputer Supplies (Tata Usaha Pengelola Keuangan)	3	PKT	3.500.000	71.500	99,32%	100,00%	10.428.500	0	10.428.500
	004441. ATK	4	PKT	3.000.000	0	100,00%	100,00%	12.000.000	0	12.000.000
	004442. Komputer Supplies	4	PKT	3.500.000	0	100,00%	100,00%	14.000.000	0	14.000.000
	004444. ATK	4	PKT	3.000.000	0	100,00%	100,00%	12.000.000	0	12.000.000
	004445. Komputer Supplies	4	PKT	3.500.000	0	100,00%	100,00%	14.000.000	0	14.000.000
<b>E</b>	<b>OPERASIONAL PIMPINAN</b>			<b>377.121.000</b>	10.510	100,00%	100,00%	261.956.431	115.154.059	377.110.490
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>			<b>86.281.000</b>	2.893	100,00%	100,00%	69.199.362	17.078.745	86.278.107
	002511. Keperluan sehari-hari pimpinan	10	BLN	4.088.800	273	100,00%	100,00%	31.949.362	8.938.365	40.887.727
	002512. Penjilidan Laporan Kegiatan Pimpinan	10	EKS	303.200	2.000	99,93%	100,00%	2.300.000	730.000	3.030.000
	002513. Layanan Pimpinan	10	PKT	1.636.100	620	100,00%	100,00%	8.950.000	7.410.380	16.360.380
	004446. ATK	4	PKT	3.000.000	0	100,00%	100,00%	12.000.000	0	12.000.000

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SISA PAGU	KEUANGAN	FISIK	BULAN NOVEMBER 2024			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				BULAN LALU	BULAN INI	S/D SAAT INI	
(1)	(2)	(3)	Blokir	405.000.000	0,03%					99,97%	
	004447. Komputer Supplies	4	PKT	3.500.000	14.000.000	0	100,00%	100,00%	14.000.000	0	14.000.000
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa</b>				<b>290.840.000</b>	7.617	100,00%	100,00%	192.757.069	98.075.314	290.832.383
	> Dalam Rangka Kegiatan Pimpinan										
	002514. Tiket ( 2 Org x 15 Prov x 1 Kl )	30	OT	4.763.000	142.890.000	835	100,00%	100,00%	97.195.375	45.693.790	142.889.165
	002515. Uang Harian ( 2 Org x 15 Prov x 3 Hr x 1 )	90	OH	500.000	45.000.000	0	100,00%	100,00%	33.140.000	11.860.000	45.000.000
	002516. Uang Penginapan ( 2 Org x 15 Prov x 2 Hr x 1 )	60	OH	1.000.000	60.000.000	500	100,00%	100,00%	30.780.500	29.219.000	59.999.500
	002517. Transport ( 2 Org x 15 Prov x 1 Kl )	30	OK	1.000.000	30.000.000	6.282	99,98%	100,00%	18.691.194	11.302.524	29.993.718
	002518. Biaya Representasi Pejabat Eselon II ( 1 Org x 15 Prov x 25 Kl )	100	OH	129.500	12.950.000	0	100,00%	100,00%	12.950.000	0	12.950.000
<b>F</b>	<b>Administrasi dan Kegiatan PPK Satker Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi</b>				<b>214.667.000</b>	40.200	99,98%	100,00%	183.370.200	31.256.600	214.626.800
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>147.667.000</b>	36.000	99,98%	100,00%	119.241.400	28.389.600	147.631.000
	> PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL)				31.500.000	28.700	99,91%	100,00%	29.441.100	2.030.200	31.471.300
	002526. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan ( 5 EKS x 5 KS x 6 BLN )	150	EKS	150.000	22.500.000	400	100,00%	100,00%	20.469.400	2.030.200	22.499.600
	002527. Penggandaan dan Penjilidan (Draft dan Final) ( 5 EKS x 12 BLN )	60	EKS	150.000	9.000.000	28.300	99,69%	100,00%	8.971.700	0	8.971.700
	> PELAKSANAAN ANGGARAN				54.814.000	4.600	99,99%	100,00%	44.868.100	9.941.300	54.809.400
	002523. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan ( 5 EKS x 5 KS x 5 BLN )	150	EKS	150.000	22.500.000	400	100,00%	100,00%	19.538.300	2.961.300	22.499.600
	002530. Penggandaan Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Anggaran ( )	25	EKS	200.000	5.000.000	2.000	99,96%	100,00%	4.998.000	0	4.998.000
	002531. Penggandaan Laporan Tahunan Pelaksanaan Anggaran ( )	25	EKS	200.000	5.000.000	0	100,00%	100,00%	0	5.000.000	5.000.000
	002532. Pencetakan, Penggandaan Dokumen SPJ ( 5 EKS x 5 KS x 12 BLN )	400	EKS	55.785	22.314.000	2.200	99,99%	100,00%	20.331.800	1.980.000	22.311.800
	> SAK / SAI				31.500.000	1.900	99,99%	100,00%	24.351.300	7.146.800	31.498.100
	002520. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan ( 5 EKS x 5 KS x 6 BLN )	150	EKS	150.000	22.500.000	1.400	99,99%	100,00%	18.714.600	3.784.000	22.498.600
	002521. Penggandaan dan Penjilidan ( 5 EKS x 12 BLN )	60	EKS	150.000	9.000.000	500	99,99%	100,00%	5.636.700	3.362.800	8.999.500
	> Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) / E-MONEV BAPPENAS / SMART DJA				29.853.000	800	100,00%	100,00%	20.580.900	9.271.300	29.852.200
	002529. Penggandaan Bahan Materi dan Pencetakan	122	EKS	150.000	18.300.000	500	100,00%	100,00%	14.689.100	3.610.400	18.299.500
	002524. Penggandaan dan Penjilidan Laporan ( 5 EKS x 10 BLN )	50	EKS	202.260	10.113.000	300	100,00%	100,00%	4.451.800	5.660.900	10.112.700
	002525. Materai ( 10 LBR x 12 BLN )	120	LBR	12.000	1.440.000	0	100,00%	100,00%	1.440.000	0	1.440.000
<b>521811</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</b>				<b>65.000.000</b>	4.200	99,99%	100,00%	62.128.800	2.867.000	64.995.800
	004318. ATK	10	PKT	3.000.000	30.000.000	1.500	100,00%	100,00%	29.458.500	540.000	29.998.500
	004319. Komputer Supplies	10	PKT	3.500.000	35.000.000	2.700	99,99%	100,00%	32.670.300	2.327.000	34.997.300
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>				<b>2.000.000</b>	0	100,00%	100,00%	2.000.000	0	2.000.000
	002534. Narasumber	2	OJ	1.000.000	2.000.000	0	100,00%	100,00%	2.000.000	0	2.000.000
<b>G</b>	<b>Penyusunan Peta Resiko DIT P2KT</b>				<b>1.979.000</b>	0	100,00%	100,00%	0	1.979.000	1.979.000
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>1.979.000</b>	0	100,00%	100,00%	0	1.979.000	1.979.000
	002537. Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kegiatan	10	EKS	197.900	1.979.000	0	100,00%	100,00%	0	1.979.000	1.979.000
<b>056</b>	<b>Koordinasi Rencana Program/Kegiatan Lintas Sektor di Kawasan Transmigrasi</b>				<b>443.971.000</b>	2.617	100,00%	100,00%	381.374.833	62.593.550	443.968.383
<b>A</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Afirmasi Lintas Sektor di Kawasan Transmigrasi Prioritas</b>				<b>443.971.000</b>	2.617	100,00%	100,00%	381.374.833	62.593.550	443.968.383
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b>				<b>74.020.000</b>	850	100,00%	100,00%	16.576.600	57.442.550	74.019.150
	002538. Snack Rapat ( 20 Org x 6 Kl )	1276	OK	20.000	25.520.000	450	100,00%	100,00%	5.548.950	19.970.600	25.519.550
	002539. Makan Rapat ( 20 Org x 6 Kl )	770	OK	50.000	38.500.000	400	100,00%	100,00%	11.027.650	27.471.950	38.499.600
	Penggandaan Pencermatan 45 Prioritas Nasional dan 108 Prioritas Kementerian	100	Eks	100.000	10.000.000	0	100,00%	100,00%	0	10.000.000	10.000.000
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>				<b>9.700.000</b>	0	100,00%	100,00%	5.800.000	3.900.000	9.700.000
	002541. Narasumber	20	OJ	485.000	9.700.000	0	100,00%	100,00%	5.800.000	3.900.000	9.700.000
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa</b>				<b>360.251.000</b>	1.767	100,00%	100,00%	358.998.233	1.251.000	360.249.233
	002542. Tiket [ 4 ORG x 10 PROV x 1 KL ]	40	OT	4.461.775	178.471.000	8.582.701	95,19%	97,94%	168.637.299	1.251.000	169.888.299
	002543. Uang Harian [ 4 ORG x 10 PROV x 3 HR x 1 KL ]	80	OH	623.975	49.918.000	-5.732.000	111,48%	100,00%	55.650.000	0	55.650.000
	002544. Uang Penginapan [ 4 ORG x 10 PROV x 2 HR x 1 KL ]	40	OH	1.997.025	79.881.000	-3.829.824	104,79%	100,00%	83.710.824	0	83.710.824
	002545. Transport [ 4 ORG x 10 PROV x 1 KL ]	40	OK	999.525	39.981.000	-3.219.110	108,05%	100,00%	43.200.110	0	43.200.110
	002546. Biaya Representasi Pejabat Eselon II [ 1 Org x 10 Prov x 8 Kl ]	80	OH	150.000	12.000.000	4.200.000	65,00%	67,75%	7.800.000	0	7.800.000
<b>6471.UBA.001</b>	<b>Fasilitas Pengurusan HPL Transmigasi</b>				<b>825.000.000</b>	55.466	99,99%	100,00%	570.418.134	254.526.400	824.944.534
<b>051</b>	<b>Fasilitas Pelepasan Kawasan Hutan</b>				<b>731.819.000</b>	53.699	99,99%	100,00%	480.511.901	251.253.400	731.765.301
<b>A</b>	<b>Kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Untuk Lahan Usaha II Lokasi Batubi</b>				<b>731.819.000</b>	53.699	99,99%	100,00%	480.511.901	251.253.400	731.765.301

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SISA PAGU	KEUANGAN	FISIK	BULAN NOVEMBER 2024			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				BULAN LALU	BULAN INI	S/D SAAT INI	
(1)	(2)	(3)	Blokir	405.000.000	0,03%					99,97%	
<b>521211</b>	<b>Sp.1., SP.2., dan SP.3 Kabupaten Natunan Provinsi Kepulauan Riau.</b> <b>Belanja Bahan</b> <b>'(KPPN.182-JAKARTA VII)</b> Penyusunan Rencana kerja			<b>85.485.000</b>	5.760	99,99%	100,00%	85.479.240	0	85.479.240	
	003325. Snack Persiapan Pembahasan Peta Rencana Kerja	20	OH	23.000	460.000	0	100,00%	100,00%	2.960.000	0	2.960.000
	003327. Pencetakan dan Penggandaan Laporan Buku Rencana Kerja	1	PKT	2.500.000	2.500.000	0	100,00%	100,00%	460.000	0	460.000
	Pelaksanaan Timber Cruising			82.525.000	5.760	99,99%	100,00%	2.500.000	0	2.500.000	
	003314. Alat Tulis Lapangan ( 3 Un x 3 Pkt )	8	Pkt	299.750	2.398.000	0	100,00%	100,00%	82.519.240	0	82.519.240
	003315. Tally Seet ( 3 Un x 3 Pkt )	8	Pkt	248.250	1.986.000	0	100,00%	100,00%	2.398.000	0	2.398.000
	003317. Batre Alkalin untuk GPS dan Kamera	2	PKT	300.000	600.000	0	100,00%	100,00%	1.986.000	0	1.986.000
	003318. Logistik Buruh di Lapangan ( 32 Or. x 18 Hr )	576	PKt	67.000	38.592.000	5.760	99,99%	100,00%	600.000	0	600.000
	003319. Perlengkapan lapangan	1	Pkt	15.678.000	15.678.000	0	100,00%	100,00%	38.586.240	0	38.586.240
	003319. Label Pohon	5	Pkt	997.000	4.985.000	0	100,00%	100,00%	15.678.000	0	15.678.000
	003320. Snack Pembahasan Hasil Pelaksanaan	20	OH	20.000	400.000	0	100,00%	100,00%	4.985.000	0	4.985.000
	003321. Makan Pembahasan Hasil Pelaksanaan	20	OH	46.000	920.000	0	100,00%	100,00%	400.000	0	400.000
	003328. Pencetakan dan Penggandaan Buku Laporan Hasil dan Peta Timber Cruising	17	PKT	998.000	16.966.000	0	100,00%	100,00%	920.000	0	920.000
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan</b> 003333. Ahli Manajemen Hutan/Ganis Canhut ( 1 org x 1 Bln )	1	OB	10.000.000	10.000.000	0	100,00%	100,00%	16.966.000	0	16.966.000
<b>522141</b>	<b>Belanja Sewa</b> 003336. GPS (Timber Cruising) ( 8 Unit x 20 Hr )	160	Unit	149.850	23.976.000	800	100,00%	100,00%	10.000.000	0	10.000.000
	003337. Kompas Shunto ( 8 Unit x 20 Hr )	160	Unit	29.975	4.796.000	800	100,00%	100,00%	10.000.000	0	10.000.000
	003338. Phi Band ( 8 Unit x 20 Hr )	160	Unit	49.950	7.992.000	0	100,00%	100,00%	36.763.200	0	36.763.200
<b>522191</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b> 003340. PSDH/DR (Potensi 25% dari luasan 1460 Ha) (AKUN421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan) <b>PSDH/DR (Potensi 25% dari luasan 1460 Ha)</b>	1	PKT	-	<b>396.154.000</b>	100	100,00%	100,00%	23.976.000	0	23.976.000
	003341. Pengolah data hasil survey ( 1 org x 1 Bln x 4 Regu )	4	OB	1.500.000	6.000.000	0	100,00%	100,00%	4.795.200	0	4.795.200
	003332. Upah Buruh di Lapangan ( 33 Or <sub>1</sub> x 17 Hr x 1 Regu )	561	OH	150.000	84.150.000	0	100,00%	100,00%	7.992.000	0	7.992.000
	003332. Upah Buruh di Lapangan (Tata Batas Blok Tebangan) ( 11 Or <sub>1</sub> x 3 Hr x 1 Regu )	33	OH	150.000	4.950.000	0	100,00%	100,00%	146.160.000	249.993.900	396.153.900
	000000. Surveyor (Timber Cruising) ( 7 Or <sub>1</sub> x 20 Hr x 1 Lok )	160	PKT	319.125	51.060.000	0	100,00%	100,00%	6.000.000	0	6.000.000
	Alih Media Dokumen Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	1	PKT	149.994.000	149.994.000	0	100,00%	100,00%	84.150.000	0	84.150.000
	Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke 74	1	PKT	100.000.000	100.000.000	100	100,00%	100,00%	4.950.000	0	4.950.000
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa</b> <b>'(KPPN.182-JAKARTA VII)</b> > Dalam Rangka Timber Cruising			<b>200.886.000</b>	16.539	99,99%	100,00%	51.060.000	0	51.060.000	
	003353. Tiket ( 3 Org x 1 Prov/Kab x 2 Kl )	6	OT	5.000.000	30.000.000	0	100,00%	100,00%	149.994.000	149.994.000	149.994.000
	003354. Transport Lokal Bandara (Jakarta) ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 Kl x 3 Kl )	6	OK	256.000	1.230.000	0	100,00%	100,00%	0	149.999.900	99.999.900
	003357. Uang Harian ( 3 Org x 1 Prov/Kab x 20 Hr x 2 Kl )	61	OH	370.000	22.570.000	0	100,00%	100,00%	0	99.999.900	99.999.900
	003358. Biaya Penginapan ( 3 Org x 1 rov/Kab/Lo x 19 Hr x 2 Kl )	20	OH	499.300	9.986.000	0	100,00%	100,00%	0	99.999.900	99.999.900
	> Dalam Rangka Tata Batas Blok Tebangan			137.100.000	16.539	99,99%	100,00%	137.083.461	0	137.083.461	
	003360. Tiket ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 1 Kl )	5	OT	4.876.800	24.384.000	200	100,00%	100,00%	24.383.800	0	24.383.800
	003344. Transport Lokal Bandara (Jakarta) ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 PP x 3 kl )	23	OK	256.000	5.888.000	0	100,00%	100,00%	5.888.000	0	5.888.000
	003345. Transport Lokal Bandara (Daerah) ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 PP x 3 kl )	30	OK	250.000	7.500.000	0	100,00%	100,00%	7.500.000	0	7.500.000
	003346. Transport Provinsi-Kabupaten PP ( 5 Org x 1 Prov/Kab x 2 PP x 3 kl )	30	OK	452.000	13.540.000	5.028	99,96%	100,00%	13.534.972	0	13.534.972
	003347. Biaya Penginapan ( 5 Org x 1 rov/Kab/Lo x 19 Hr x 2 kl )	180	OH	476.600	85.788.000	11.311	99,99%	100,00%	85.776.689	0	85.776.689
<b>524113</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b> 003340. Transport Dalam Kota	11	OT	230.000	2.530.000	30.500	98,79%	100,00%	1.240.000	1.259.500	2.499.500
<b>053</b>	<b>Fasilitasi Pengurusan HPL Transmigrasi</b>	<b>2</b>	<b>Daerah</b>	<b>93.181.000</b>	1.767	100,00%	100,00%	1.240.000	1.259.500	2.499.500	
<b>A</b>	<b>Klarifikasi Pengurusan HPL Transmigrasi</b>			<b>93.181.000</b>	1.767	100,00%	100,00%	89.906.233	3.273.000	93.179.233	
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan</b> <b>'(KPPN.182-JAKARTA VII)</b>			<b>3.274.000</b>	1.000	99,97%	100,00%	89.906.233	3.273.000	93.179.233	

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SISA PAGU	KEUANGAN	FISIK	BULAN NOVEMBER 2024			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				BULAN LALU	BULAN INI	S/D SAAT INI	
(1)	(2)	(3)	Blokir	405.000.000	0,03%					99,97%	
	003363. Konsumsi Rapat Klarifikasi Pengurusan HPL Transmigrasi (Snack) ( 20 Org x 2 Kl )	0	OK	-	-						
	003365. Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2	PKT	1.637.000	3.274.000	1.000	99,97%	100,00%	0	3.273.000	3.273.000
<b>524111</b>	<b>Belanja Perjalanan Biasa (KPPN.182-JAKARTA VII)</b>				<b>89.907.000</b>	767	100,00%	100,00%	89.906.233	0	89.906.233
	003366. Tiket ( 4 Org x 2 Prov x 1 Kl )	8	OT	5.000.000	40.000.000	120	100,00%	100,00%	39.999.880	0	39.999.880
	003367. Transport ( 4 Org x 2 KAB x 1 Kl )	8	OK	1.488.375	11.907.000	147	100,00%	100,00%	11.906.853	0	11.906.853
	003368. Uang Harian ( 4 Org x 2 Prov x 5 Hr x 1 Kl )	40	OH	400.000	16.000.000	500	100,00%	0,00%	15.999.500	0	15.999.500
	003369. Biaya Penginapan ( 4 Org x 2 rov/Kab/Lo x 4 Hr x 1 Kl )	32	OH	687.500	22.000.000	0	100,00%	100,00%	22.000.000	0	22.000.000
<b>6471.AFA</b>	<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria [Base Line]</b>	<b>2</b>	<b>NSPK</b>		<b>288.420.000</b>	813.203	99,72%	100,00%	287.606.797	0	287.606.797
<b>6471.AFA.006</b>	<b>NSPK Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>2</b>	<b>NSPK</b>		<b>288.420.000</b>	813.203	99,72%	100,00%	287.606.797	0	287.606.797
<b>054</b>	<b>Penyusunan NSPK Rencana Pengembangan Masyarakat</b>	<b>2</b>	<b>NSPK</b>		<b>288.420.000</b>	813.203	99,72%	100,00%	287.606.797	0	287.606.797
<b>A</b>	<b>Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat KPB</b>				<b>136.365.000</b>	25.975	99,98%	100,00%	136.339.025	0	136.339.025
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>16.116.000</b>	24.000	99,85%	100,00%	16.092.000	0	16.092.000
	001297. Penggandaan Bahan materi	80	EKS	25.000	2.000.000	2.500	99,88%	100,00%	1.997.500	0	1.997.500
	001304. Snack Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	24.000	360.000	8.000	97,78%	100,00%	352.000	0	352.000
	001305. Makan Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	52.800	792.000	0	100,00%	100,00%	792.000	0	792.000
	001306. Snack Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	24.000	480.000	0	100,00%	100,00%	480.000	0	480.000
	001307. Makan Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	52.500	1.050.000	500	99,95%	100,00%	1.049.500	0	1.049.500
	001308. Penggandaan Laporan Pendahuluan	4	EKS	225.000	900.000	0	100,00%	100,00%	900.000	0	900.000
	001309. Snack Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	24.000	600.000	2.000	99,67%	100,00%	598.000	0	598.000
	001310. Makan Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	53.000	1.325.000	5.000	99,62%	100,00%	1.320.000	0	1.320.000
	001311. Penggandaan Laporan Antara	4	EKS	247.500	990.000	0	100,00%	100,00%	990.000	0	990.000
	001298. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	24.000	360.000	3.000	99,17%	100,00%	357.000	0	357.000
	001299. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	51.000	765.000	0	100,00%	100,00%	765.000	0	765.000
	001300. Penggandaan Draft Laporan Akhir	4	PKT	297.500	1.190.000	0	100,00%	100,00%	1.190.000	0	1.190.000
	001301. Snack Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	24.000	720.000	0	100,00%	100,00%	720.000	0	720.000
	001302. Makan Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	52.800	1.584.000	0	100,00%	100,00%	1.584.000	0	1.584.000
	001303. Penggandaan Laporan Akhir	5	EKS	600.000	3.000.000	3.000	99,90%	100,00%	2.997.000	0	2.997.000
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>80.370.000</b>	0	100,00%	100,00%	80.370.000	0	80.370.000
	> <i>Tenaga Ahli</i>				80.370.000	0	100,00%	100,00%	80.370.000	0	80.370.000
	001312. Ahli Planologi	3	OB	7.350.000	22.050.000	0	100,00%	100,00%	22.050.000	0	22.050.000
	001313. Ahli Sosiologi/Pengembangan Masyarakat	3	OB	6.480.000	19.440.000	0	100,00%	100,00%	19.440.000	0	19.440.000
	001314. Ahli Sosial Ekonomi Pertanian	3	OB	6.480.000	19.440.000	0	100,00%	100,00%	19.440.000	0	19.440.000
	001315. Ahli Tehnik Sipil	3	OB	6.480.000	19.440.000	0	100,00%	100,00%	19.440.000	0	19.440.000
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>5.400.000</b>	0	100,00%	100,00%	5.400.000	0	5.400.000
	001316. Narasumber ( 1 org x 3 kl x 2 jam )	6	OJ	900.000	5.400.000	0	100,00%	100,00%	5.400.000	0	5.400.000
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>34.479.000</b>	1.975	99,99%	100,00%	34.477.025	0	34.477.025
	> <i>Petugas Pusat / Tenaga Ahli</i>				33.054.000	1.975	99,99%	100,00%	33.052.025	0	33.052.025
	001320. Tiket ( 4 org x 1 kpb x 1 kl )	4	OT	Rp 3.395.250	13.581.000	775	99,99%	100,00%	13.580.225	0	13.580.225
	001321. Uang Harian ( 4 org x 1 kpb x 4 hr )	16	OH	Rp 593.750	9.500.000	0	100,00%	100,00%	9.500.000	0	9.500.000
	001322. Uang Penginapan ( 4 org x 1 kpb x 3 hr )	12	OH	Rp 571.750	6.861.000	1.000	99,99%	100,00%	6.860.000	0	6.860.000
	001323. Transport Lokal ( 4 org x 1 kpb x 1 kl )	4	OT	Rp 778.000	3.112.000	200	99,99%	100,00%	3.111.800	0	3.111.800
	>>> Transport Daerah				1.425.000	0	100,00%	100,00%	1.425.000	0	1.425.000
	001319. Peserta Daerah ( 15 org x 1 kl )	15	OH	Rp 95.000	1.425.000	0	100,00%	100,00%	1.425.000	0	1.425.000
<b>B</b>	<b>Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan</b>				<b>152.055.000</b>	787.228	99,48%	100,00%	151.267.772	0	151.267.772
<b>521211</b>	<b>Belanja Bahan (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>25.205.000</b>	94.200	99,63%	100,00%	25.110.800	0	25.110.800
	001328. Penggandaan Bahan Materi	80	EKS	25.000	2.000.000	6.200	99,69%	100,00%	1.993.800	0	1.993.800

KODE/AKUN	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SISA PAGU	KEUANGAN	FISIK	BULAN NOVEMBER 2024			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA				BULAN LALU	BULAN INI	S/D SAAT INI	
(1)	(2)	(3)	Blokir	405.000.000	0,03%					99,97%	
	001335. Snack Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	24.000	360.000	8.000	97,78%	100,00%	352.000	0	352.000
	001336. Makan Rapat Persiapan ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OH	53.000	795.000	25.000	96,86%	100,00%	770.000	0	770.000
	001337. Snack Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	24.000	480.000	0	100,00%	100,00%	480.000	0	480.000
	001338. Makan Presentasi Laporan Pendahuluan ( 20 org x 1 hr x 1 kl )	20	OK	53.000	1.060.000	0	100,00%	100,00%	1.060.000	0	1.060.000
	001339. Penggandaan Laporan Pendahuluan	4	EKS	225.000	900.000	6.000	99,33%	100,00%	894.000	0	894.000
	001340. Snack Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	24.000	600.000	2.000	99,67%	100,00%	598.000	0	598.000
	001341. Makan Presentasi Laporan Antara ( 25 org x 1 hr x 1 kl )	25	OK	53.000	1.325.000	26.000	98,04%	100,00%	1.299.000	0	1.299.000
	001342. Penggandaan Laporan Antara	4	EKS	250.000	1.000.000	0	100,00%	100,00%	1.000.000	0	1.000.000
	001329. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	24.000	360.000	8.000	97,78%	100,00%	352.000	0	352.000
	001330. Konsumsi Musyawarah Masyarakat (FGD) ( 15 org x 1 hr x 1 kl )	15	OK	53.000	795.000	3.000	99,62%	100,00%	792.000	0	792.000
	001331. Penggandaan Draft Laporan Akhir	4	PKT	300.000	1.200.000	8.000	99,33%	100,00%	1.192.000	0	1.192.000
	001332. Snack Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	24.000	720.000	0	100,00%	100,00%	720.000	0	720.000
	001333. Makan Penyusunan Laporan Akhir ( 30 org x 1 hr x 1 kl )	30	OK	53.000	1.590.000	0	100,00%	100,00%	1.590.000	0	1.590.000
	001334. Penggandaan Laporan Akhir Penyusunan Renbangmas	200	EKS	20.100	4.020.000	0	100,00%	100,00%	4.020.000	0	4.020.000
	Penggandaan Laporan Akhir Sarana dan Prasarana Penyusunan Renbangmas	500	EKS	16.000	8.000.000	2.000	99,98%	100,00%	7.998.000	0	7.998.000
<b>522131</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>81.000.000</b>	<b>690.000</b>	<b>99,15%</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.310.000</b>	<b>0</b>	<b>80.310.000</b>
	> <i>Tenaga Ahli</i>				81.000.000	690.000	99,15%	100,00%	80.310.000	0	80.310.000
	001343. Ahli Planologi	3	OB	7.500.000	22.500.000	465.000	97,93%	100,00%	22.035.000	0	22.035.000
	001344. Ahli Sosiologi/Pengembangan Masyarakat	3	OB	6.500.000	19.500.000	75.000	99,62%	100,00%	19.425.000	0	19.425.000
	001345. Ahli Sosial Ekonomi Pertanian	3	OB	6.500.000	19.500.000	75.000	99,62%	100,00%	19.425.000	0	19.425.000
	001346. Ahli Tehnik Sipil	3	OB	6.500.000	19.500.000	75.000	99,62%	100,00%	19.425.000	0	19.425.000
<b>522151</b>	<b>Belanja Jasa Profesi (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>
	001347. Narasumber Perencanaan dan Pengembangan Wilayah ( 1 org x 3 kl x 2 jam )	6	OJ	900.000	5.400.000	0	100,00%	100,00%	5.400.000	0	5.400.000
	004675. Narasumber Perencanaan Pembangunan Wilayah, Perdesaan, dan Pengembangan Ekonomi Lokal ( 1 org x 1 kl x 2 jam )	2	OJ	900.000	1.800.000	0	100,00%	100,00%	1.800.000	0	1.800.000
<b>524111</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.182-Jakarta VII)</b>				<b>38.650.000</b>	<b>3.028</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.646.972</b>	<b>0</b>	<b>38.646.972</b>
	> <i>Petugas Pusat / Tenaga Ahli</i>				37.225.000	3.028	99,99%	100,00%	37.221.972	0	37.221.972
	001351. Tiket ( 4 org x 1 kws x 1 kl )	4	OT	Rp 3.682.250	14.729.000	1.628	99,99%	100,00%	14.727.372	0	14.727.372
	001352. Uang Harian ( 4 org x 1 kws x 6 hr )	24	OH	Rp 475.000	11.400.000	0	100,00%	100,00%	11.400.000	0	11.400.000
	001353. Uang Penginapan ( 4 org x 1 kws x 5 hr )	20	OH	Rp 461.500	9.230.000	400	100,00%	100,00%	9.229.600	0	9.229.600
	001354. Transport Lokal ( 4 org x 1 kws x 1 kl )	4	OT	Rp 466.500	1.866.000	1.000	99,95%	100,00%	1.865.000	0	1.865.000
	> <i>Petugas Daerah</i>				-	-					
	Uang Harian ( 1 org x 1 kws x 3 kl )	0	OT	Rp 300.000	-	-					
	Uang Penginapan ( 1 org x 1 kws x 2 hr )	0	OH	Rp 300.000	-	-					
	Transport ( 1 org x 1 kws x 1 hr )	0	OH	Rp 300.000	-	-					
	>> <i>Petugas Daerah</i>				1.425.000	0	100,00%	100,00%	1.425.000	0	1.425.000
	001356. Uang Harian ( 15 org x 1 kl )	15	OH	Rp 95.000	1.425.000	0	100,00%	100,00%	1.425.000	0	1.425.000

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

### IKU 1.1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi Yang Ditetapkan

	Bidang Teknis	Jenis Dokumen	Realisasi	Capaian	Link Evidence
1.1	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan				
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan dalam rangka Mendukung Konsep Transpolitan;	3 Dok	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WxZP0eH8IysnItul3XkX6BTRd5afPXL2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1WxZP0eH8IysnItul3XkX6BTRd5afPXL2?usp=sharing</a>
		2. Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Transmigrasi di Perbatasan Negara Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat.			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1paO_J06nJ-PjJvSaNI2jhpUWWGaz7Mbh?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1paO_J06nJ-PjJvSaNI2jhpUWWGaz7Mbh?usp=sharing</a>
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	3. Monitoring dan Pendampingan RTSP- RT Pusat SKP			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1opihjY6YbO94zcpPQbGuwPp7ipiOrK2R?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1opihjY6YbO94zcpPQbGuwPp7ipiOrK2R?usp=sharing</a>

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

### IKU 1.2 1.2 Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

	Bidang Teknis	Jenis Dokumen	Realisasi	Capaian	Link Evidence
1.2	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan				
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru	1. Klarifikasi dan Koordinasi Bidang Rencana Rinci SKP dan Rencana Detail KPB	3 Dok	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZBzOWuxLKI5M9m7j8ifwyZYEfJI0H7bG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZBzOWuxLKI5M9m7j8ifwyZYEfJI0H7bG?usp=sharing</a>
		2. Kegiatan Visualisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru di Kawasan Transmigrasi Telang			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12dY39q1_4yqRa9XrKwFrHWhRGiPtc9hK?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12dY39q1_4yqRa9XrKwFrHWhRGiPtc9hK?usp=sharing</a>
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	3. Klarifikasi bidang Perencanaan Pengembangan Masyarakat			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OMPYTENd8IGzOcdhTHT3HVV4U-4KH91?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1OMPYTENd8IGzOcdhTHT3HVV4U-4KH91?usp=sharing</a>

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

### IKU 2.1 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL

No	Bidang Teknis	Keterangan			Link Evidence
		Lokasi/Kab/Provinsi	Luasan (Ha)	Dokumen	
1	Fasilitasi Legalisasi Tanah	1. Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara	368,25 Ha	SK HPL Nomor 1/HPL/KEM-ATR/BPN/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/179kOIx9qpUIzW1X5H6Zv4Dggilmhh887?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/179kOIx9qpUIzW1X5H6Zv4Dggilmhh887?usp=sharing</a>
		2. Desa Kahingai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	588,26 Ha	SK HPL Nomor : 11/HPL/KEM-ATR/BPN/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024	
		3. Desa Dungkean, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Selatan	133,65 Ha	Telah dilakukan pengurusan HPL Transmigrasi, saat ini dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR/BPN	
		4. Desa Watutinawu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara	334,08 Ha	Telah dilakukan pengurusan HPL Transmigrasi, saat ini dalam proses penerbitan SK HPL di Kementerian ATR/BPN	
		<b>Jumlah</b>	<b>1.424,49 Ha</b>		

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

### IKU 2.2 Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat HPL

No	Bidang Teknis	Keterangan			Link Evidence
		Lokasi/Kab/Provinsi	Luasan (Ha)	Dokumen	
1	Fasilitasi Legalisasi Tanah	1. Desa Sinyoinyoi, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	73,79 Ha	Sertipikat No.10 Tahun 2024 Tanggal 19 Januari 2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1INyncefTfJGDnnsvdT815n2DcO8gnig/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1INyncefTfJGDnnsvdT815n2DcO8gnig/view?usp=sharing</a>
		2. Desa Sinyoinyoi, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	137,60 Ha	Sertipikat No.09 Tahun 2024 Tanggal 8 Januari 2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1oK4dHUDOaj9GJITPSwQfLC6p2i8KHVZZ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1oK4dHUDOaj9GJITPSwQfLC6p2i8KHVZZ/view?usp=sharing</a>
		3. Desa Kahingai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	598,66 Ha	Sertipikat No. 00005, 00006, 00007, 00008, 00009, 00010, 00011, 00012, 00013 Tahun terbit 2024 (Tanggal 7 Agustus 2024)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1LDZhXUPxKuBxSWt85j8iDmbQJ04nCxCf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LDZhXUPxKuBxSWt85j8iDmbQJ04nCxCf/view?usp=sharing</a>
		4. Desa Kanapa-Napa, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara	26,49 Ha	Sertipikat NIB. 21160000010020; 21160000010040; 21160000010050; 21160000010100; 21160000010110; 21160000010130; 21160000010140; 21160000010150; 21160000010160;	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_u5pptDe9xfdZnjG7zqtFSA5tpFqB-YC?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1_u5pptDe9xfdZnjG7zqtFSA5tpFqB-YC?usp=sharing</a>

No	Bidang Teknis	Keterangan			Link Evidence
		Lokasi/Kab/Provinsi	Luasan (Ha)	Dokumen	
				21160000010170; 21160000010180; 21160000010190; 21160000010200; 21160000010210; 21160000010220; 21160000010240 Tahun terbit 2024 (Tanggal 09 Agustus 2024)	
		5. Desa Sungai Baru, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	330,29 Ha	Sertipikat NIB. 15.14.000000944.0 Tahun 2024 (14 Oktober 2024)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1P_qRjLlxAPVKftVj1JKweR8cCvXtvVTQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1P_qRjLlxAPVKftVj1JKweR8cCvXtvVTQ/view?usp=sharing</a>
		<b>Jumlah</b>	<b>1.166,83 Ha</b>		

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

### IKU 2.3 Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi

No	Bidang Teknis	Keterangan		Link Evidence
		Lokasi/Kab/Provinsi	Dokumen	
1	Fasilitasi Legalisasi Tanah	Desa Bulu, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil Kegiatan Pendampingan Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Transmigrasi Pada Calon Lokasi Sp Pugar Di Desa Bulu, Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-4z-45feu7G39MEwMCyZ9NZhMjsSzRsQ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1-4z-45feu7G39MEwMCyZ9NZhMjsSzRsQ?usp=sharing</a>

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

IKU 3.1 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

No	Kerja Sama/Koordinasi Kegiatan	Link Evidence
1	Koordinasi Perpanjangan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) yang diselenggarakan oleh Ditjen PEID dengan Dit. P2KT	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Zn5K98tnTYMpfmQPR1mTYD4DM2_ii4jN?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Zn5K98tnTYMpfmQPR1mTYD4DM2_ii4jN?usp=sharing</a>
2	Kelompok Kerja Forum Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/16NqKIpHRJVrHYZD4vvMF53CFBBXfUZh1?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/16NqKIpHRJVrHYZD4vvMF53CFBBXfUZh1?usp=sharing</a>
3	Koordinasi Kegiatan Pencermatan 45 Kawasan Transmigrasi	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1C46OPI-6HgncFkWyM5ZqEy5hc5Ir74L?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1C46OPI-6HgncFkWyM5ZqEy5hc5Ir74L?usp=sharing</a>

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

IKU 3.2 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

No	Kerja Sama/Koordinasi Kegiatan/Program	Link Evidence
1	Pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan pembentukan Komite Teknis Perumus SNI	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/19ZUW8iiIf6e3iRpa0vPpuSzzII_ZfDzL?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/19ZUW8iiIf6e3iRpa0vPpuSzzII_ZfDzL?usp=sharing</a>
2	Percepatan Kemandirian Masyarakat Melalui Optimalisasi Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Jagung di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HnNJIMFkaWEVFD4hXAmkuRfBRBq7FkuW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1HnNJIMFkaWEVFD4hXAmkuRfBRBq7FkuW?usp=sharing</a>
3	Koordinasi tindak lanjut kerja sama TNI AD dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yC4i7HWPH_HL9D0qervrRbqM5dpQJOxL?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1yC4i7HWPH_HL9D0qervrRbqM5dpQJOxL?usp=sharing</a>

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

### IKU 4.1 Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan

	Bidang Teknis	Regulasi dan Kebijakan	Realisasi	Capaian	Link Evidence
4.1	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan				
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	1. Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Perkotaan Baru	4	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yZHMqefQ8jMEegCh1Rgy8rq8TYHIpvMr?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1yZHMqefQ8jMEegCh1Rgy8rq8TYHIpvMr?usp=sharing</a>
		2. Penyusunan Petunjuk Teknis Rencana Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/14mYUqfBt33uW3N7asW-yuqcG2rq-YxZB?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/14mYUqfBt33uW3N7asW-yuqcG2rq-YxZB?usp=sharing</a>
	Fasilitasi Legalisasi Tanah	3. Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Umum			<a href="https://drive.google.com/file/d/1_GTsSAGacIIsF6P4r2-hbH99Pv0TJShu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1_GTsSAGacIIsF6P4r2-hbH99Pv0TJShu/view?usp=sharing</a>
		4. Reviu SOP Pelepasan HPL Transmigrasi untuk Kepentingan Pemerintah, Sosial, keagamaan dan kemasyarakatan			<a href="https://drive.google.com/file/d/11Ib6qonLCyywPieLe3DfsWBcx3sdjJy7/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11Ib6qonLCyywPieLe3DfsWBcx3sdjJy7/view?usp=sharing</a>

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

IKU 5.1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti

Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan BPK

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan  
Transmigrasi Sampai Desember 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1if0AGYsJXSEs1RFj9kSQ9Etuv6zQwCGE?usp=sharing>

## BUKTI DUKUNG OUTPUT

### Capaian Kinerja Lainnya

No	Kegiatan	Link Evidence
1	Pembangunan Zona Integritas Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pBwgcpLZfU9sM-9UEa85gUMPYaeJvqmG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1pBwgcpLZfU9sM-9UEa85gUMPYaeJvqmG?usp=sharing</a>
2	Media Informasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Transpolitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MEqbToJ0eSawSLntFxcZynlGyDS6CEI2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1MEqbToJ0eSawSLntFxcZynlGyDS6CEI2?usp=sharing</a>